



**KORELASI KETERBUKAAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN
PENDAPATAN DI INDONESIA TAHUN 1987-2017**

SKRIPSI

Oleh:

**Dini Yuli Astutik
150810101244**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2019**



**KORELASI KETERBUKAAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN
PENDAPATAN DI INDONESIA TAHUN 1987-2017**

SKRIPSI

Oleh:

**Dini Yuli Astutik
150810101244**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

PERSEMBAHAN

Dengan segenap kerendahan hati dan rasa syukur yang sangat besar kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas kehendaknya yang menghadirkan takdir terbaik dalam kehidupan saya sehingga mampu menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, bermoral, beriman, dan bersabar.

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ayahanda Toha dan Ibunda Rukiyah yang sangat saya hormati;
2. Kakak-kakak saya yang tercinta;
3. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
4. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
5. Para sahabat yang saya cintai

MOTTO

“Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan teteplah bersiap siaga dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu menang”
(QS. Al Imran; 200)

“Pendidikan merupakan senjata paling ampu yang bisa kamu gunakan untuk merubah dunia”
(Nelson Mandela)

“Akal budi dan pengetahuan adalah laksana raga dan jiwa. Tanpa raga, jiwa menjadi kosong belakang kecuali hanya berupa angin hampa. Tanpa jiwa, raga hanyalah kerangka tulang tanpa perasaan.
(Kahlil Gibran)

“Tidak penting seberapa lambat anda berjalan, selama anda tidak berhenti”
(Confucius)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dini Yuli Astutik

Nim : 150810101244

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Korelasi Keterbukaan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika terdapat kutipan yang sudah saya cantumkan dari sumbernya, belum pernah diajukan di institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia untuk menerima sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Agustus 2019

Yang Menyatakan,

Dini Yuli Astutik

NIM: 150810101244

SKRIPSI

**KORELASI KETERBUKAAN EKONOM DAN KETIMPANGAN
PENDAPATAN DI INDONESIA TAHUN 1987-2017**

Oleh:

Dini Yuli Astutik

150810101244

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Fajar Wahyu Prianto, S.E., M.E.

Dosen Pembimbing Anggota : Fivien Muslihatinningsih, S.E., M.Si.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : KORELASI KETERBUKAAN EKONOMI DAN
KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA
TAHUN 1987-2017

Nama Mahasiswa : Dini Yuli Astutik

Nim : 150810101244

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Regional

Tanggal Persetujuan : 7 Agustus 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Fajar Wahyu Prianto, S.E., M.E.

NIP. 198103302005011003

Fivien Muslihatinningsih, S.E., M.Si.

NIP. 198301162008122001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi

Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E., M.P.

NIP. 197207131999031001

PENGESAHAN

Judul skripsi

**Korelasi Keterbukaan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di
Indonesia Tahun 1987-2017**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Dini Yuli Astutik

Nim : 150810101244

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

31 Oktober 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dr. Endah Kurnia Lestari, S.E., M.E. (.....)
NIP. 197804142001122003
2. Sekretaris : Dr. M. Fathorrazi, S.E., M.Si. (.....)
NIP. 196306141990021001
3. Anggota : Dr. Lilis Yuliati, S.E., M.Si. (.....)
NIP. 196907181995122001

Mengetahui/Menyetujui,
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,



Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., CA.
NIP. 197107271995121001

**KORELASI KETERBUKAAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN
PENDAPATAN DI INDONESIA TAHUN 1987-2017**

Dini Yuli Astutik

Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi yang secara terus menerus berkelanjutan secara tidak langsung untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi disuatu negara. Keterbukaan ekonomi adalah salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara merata di suatu negara. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis kuantitatif. Metode analisis kuantitatif berupa Kausalitas Granger memiliki tujuan untuk mengetahui korelasi keterbukaan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Hasil yang diperoleh adalah perdagangan internasional tidak memiliki hubungan kausalitas dengan ketimpangan pendapatan ataupun sebaliknya. Sedangkan ketimpangan pendapatan memiliki hubungan kausalitas dengan FDI, sebaliknya FDI tidak memiliki hubungan kausalitas dengan ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Kata Kunci : Perdagangan Internasional, FDI, Ketimpangan Pendapatan

***CORRELATION OF ECONOMIC OPENNESS AND INCOME INEQUALITY
IN INDONESIA 1987-2017***

Dini Yuli Astutik

Departement of Economics, Faculty of Economics and Business , the University
of Jember

ABSTRACT

Economic development that is continuously sustainable indirectly to increase economic growth in a country. Economic openness is one way to increase economic growth equally in a country. The analytical method used is the quantitative analysis method. The quantitative analysis method in the form of Granger Causality aims to determine the correlation between economic openness and income inequality. The result obtained are that international trade does not have a causal relationship with income inequality or vice versa. While income inequality has a causal relationship with FDI, conversely FDI does not have a causality relationship with income inequality in Indonesia.

Keywords : International Trade, FDI, Income Inequality

RINGKASAN

Korelasi Keterbukaan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Tahun 1987-2017; Dini Yuli Astutik; 150810101244; Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Pembangunan ekonomi di era globalisasi saat ini diseluruh penjuru dunia menjalankan sistem perekonomian terbuka. Dengan adanya keterbukaan ekonomi menghubungkan kerjasama antar negara melalui perdagangan internasional dan FDI. Perdagangan internasional didasarkan pada ekspor dan impor yang menjadi salah satu komponen untuk pembentukan PDB dari sisi pengeluaran suatu negara. Menurut Alan M. Rugman bahwa FDI dipengaruhi oleh variabel lingkungan dan variabel internal. FDI merupakan proses dimana pelaku ekonomi, individu maupun kelompok/perusahaan dari suatu negara memperoleh kepemilikan aset dengan tujuan untuk mengontrol produksi, distribusi, dan aktivitas lainnya dari suatu perusahaan di negara lain.

Tujuan dari penelitian ini dijelaskan dalam pertanyaan empiris yaitu untuk mengetahui apakah perdagangan internasional, FDI memiliki hubungan kausalitas dengan ketimpangan pendapatan. Berdasarkan hasil estimasi kausalitas Granger menunjukkan bahwa yang memiliki hubungan searah yaitu variabel ketimpangan pendapatan terhadap variabel FDI.

PRAKATA

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya. Sholawat serta saLam semoga tetap tercurah kepada Rsulullah Muhammad SAW, sehingg penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Korelasi Keterbukaan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia Tahun 1987-2017”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunn di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa motivasi, nasehat, saran maupun kritik yang membangun. Oleh krena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Fajar Wahyu Prianto, S.E., M.E. selaku dosen pembimbing I yang besrsedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik, nasehat dan pengarahan dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan penuh perhatian dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Fivien Muslihatinningsih, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing II yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik, nasehat dan pengarahan dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan penuh perhatian dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Siswoyo Hari S., S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing akademik (DPA) selama kuliah terimakasih atas nasehat, arahnya dan bimbinganya selama penulis menjadi mahasiswa.
4. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., CA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember.
5. Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E., M.P. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Ekonomi
6. Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, terimakasih atas bimbingan dan pelayanannya selama penulis menjadi mahasiswa.

7. Ayahanda Toha, Ibunda Rukiyah, Kakak Sugiono, Kakak Subairi dan Kakak Indra yang selalu setia berada di samping penulis, terimakasih banyak ananda ucapkan atas segala doa yang selalu terpanjatkan serta kasih sayang yang selalu diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan penuh kelancaran.
8. Calon teman hidupku terima kasih sudah mengajarkan arti kesabaran, sehingga mempengaruhi untuk selalu bersabar dalam menyelesaikan skripsi.
9. Sahabat-sahabat terbaikku Siti Aisah, Khusnul Khotimah, Arista Dwi Wuri, Siska Dwi, Nafiatus Sholihah, Prista Ega Irfanti, dan seluruh angkatan 2015 Ilmu Ekonomi, terimakasih atas bantuan serta motivasinya selama ini.
10. Terimakasih kepada teman-teman KKN 243' Agel Jangkar Situbondo Ayu, Diah, Dahniar, Devita, Agung dan hadi, serta perangkat-perangkat desa dan pemuda-pemudi Agel terimakasih atas motivasi dan doanya.

Jember, 30 Agustus 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL JUDUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN.....	xi
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR ISTILAH	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi	8
2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi	13
2.1.3 Teori Ketimpangan pendapatan.....	13
2.1.4 Teori Perdagangan Internasional	16
2.1.5 Liberalisasi Perdagangan di Indonesia.....	20
2.1.6 <i>Foreign Direct Investment</i> (FDI).....	24
2.1.7 Korelasi Keterbukaan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan.....	26
2.2 Penelitian Sebelumnya	31
2.3 Kerangka Konseptual	34
2.4 Hipotesis Penelitian	37
BAB 3. METODELOGI PENELITIAN	38
3.1 Jenis penelitian.....	38

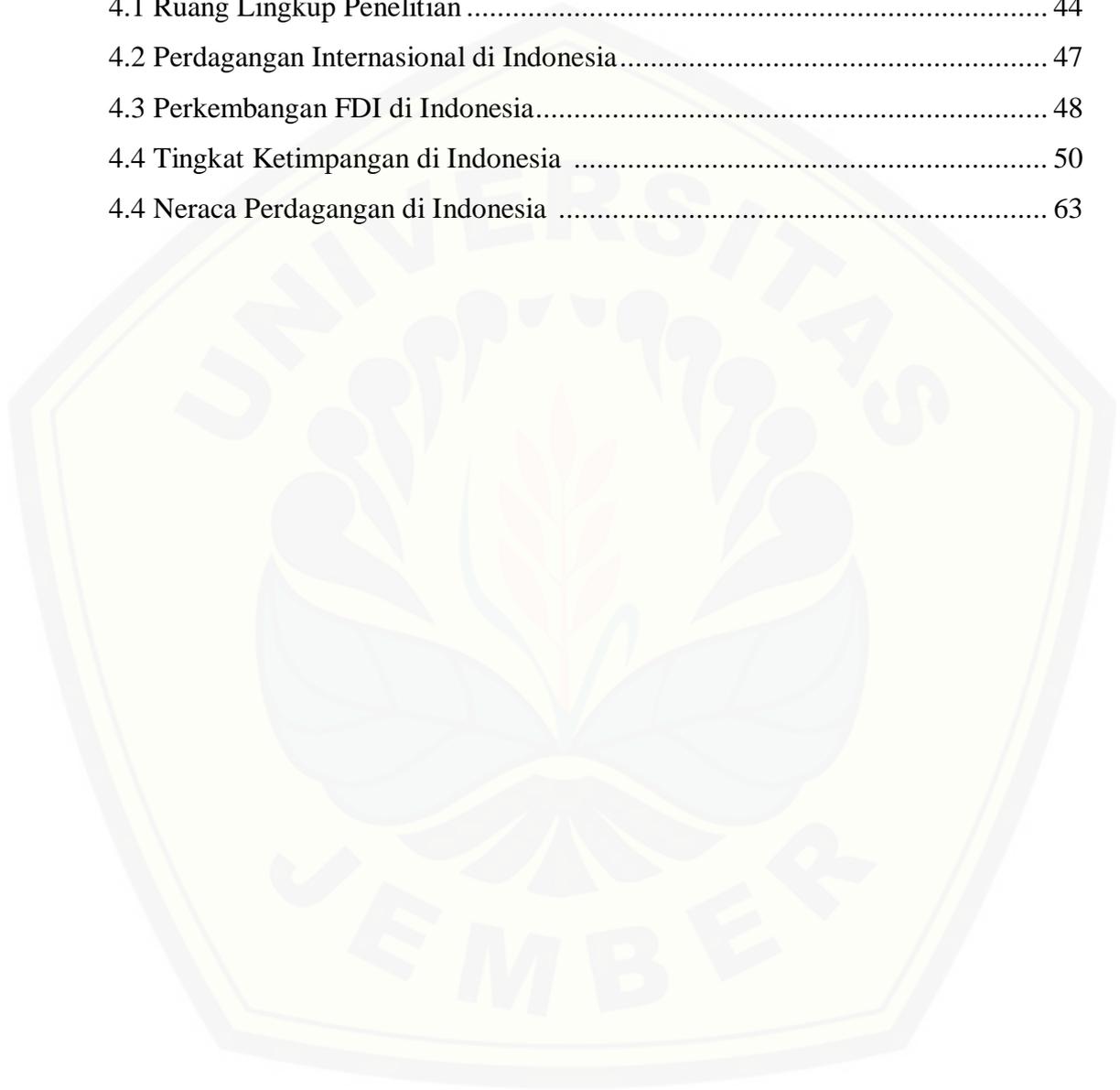
3.2 Jenis dan Sumber Data	38
3.3 Spesifikasi Model	38
3.4 Metode Analisis Data	39
3.4.1 Uji Akar-Akar Unit (<i>Unit Root Test</i>)	39
3.4.2 Uji Derajat Integrasi	40
3.4.3 Uji Kointegrasi	40
3.2.4 Uji <i>Lag</i> Optimum	41
3.2.5 Uji Kausalitas Granger	41
3.5 Definisi Operasional Variabel	42
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Gambaran Umum Perekonomian di Indonesia	44
4.2 Gambaran Umum Variabel Penelitian	46
4.2.1 Dinamika Perkembangan Perdagangan Internasional	46
4.2.2 Dinamika Perkembangan FDI di Indonesia	47
4.2.3 Dinamika Ketimpangan Pendapatan di Indonesia	49
4.3 Analisis Model Kausalitas Granger	50
4.3.1 Hasil Uji Akar Unit	51
4.3.2 Hasil Uji Kointegrasi	52
4.3.3 Hasil Uji <i>Lag</i> Optimum	53
4.3.4 Hasil Uji Kausalitas Granger	54
4.4 Pembahasan	58
4.4.1 Korelasi Kausalitas Granger Perdagangan Internasional dan Ketimpangan Pendapatan	59
4.4.2 Korelasi Kausalitas Granger FDI dan Ketimpangan Pendapatan	64
BAB 5. PENUTUP	69
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Nilai Ekspor dan Impor Indonesia tahun 2015-2017	3
1.2 FDI di Indonesia tahun 2010-2017	5
1.3 Koefisien Gini di Indonesia tahun 2010-2015.....	5
2.2 Ringkasan Penelitian Sebelumnya	31
2.2.1 Perbedaan dan Persamaan dari penelitian Sebelumnya	34
4.1 Uji Akar-akar Unit dan Uji Derajat Kointegrasi Menggunakan ADF	52
4.2 Hasil Uji Kointegrasi.....	53
4.3 Hasil Uji Lag Optimum.....	54
4.4 Hasil Uji Kausalitas Granger	55

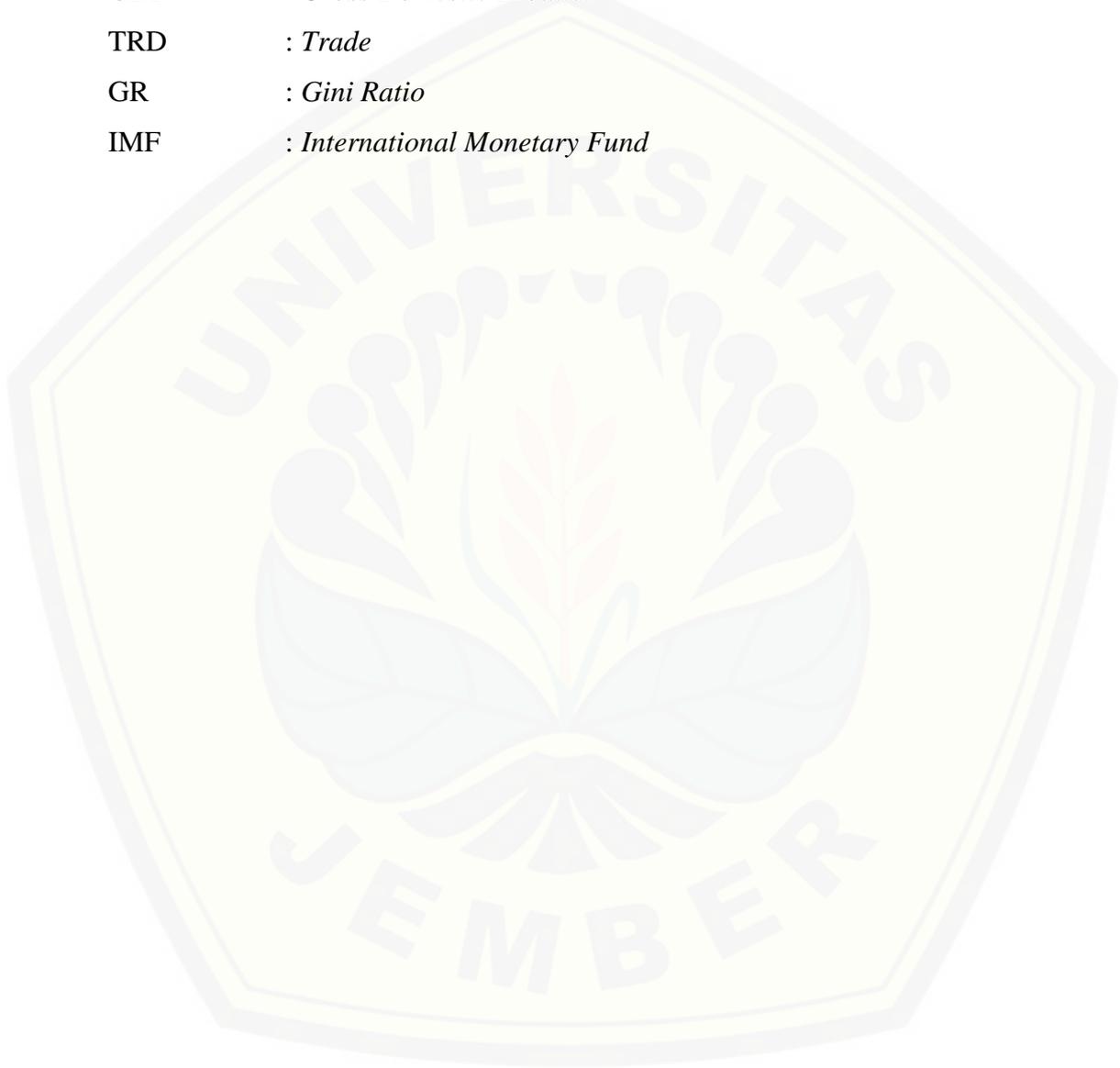
DAFTAR GAMBAR

	Halaman
4.1 Ruang Lingkup Penelitian	44
4.2 Perdagangan Internasional di Indonesia.....	47
4.3 Perkembangan FDI di Indonesia.....	48
4.4 Tingkat Ketimpangan di Indonesia	50
4.4 Neraca Perdagangan di Indonesia	63



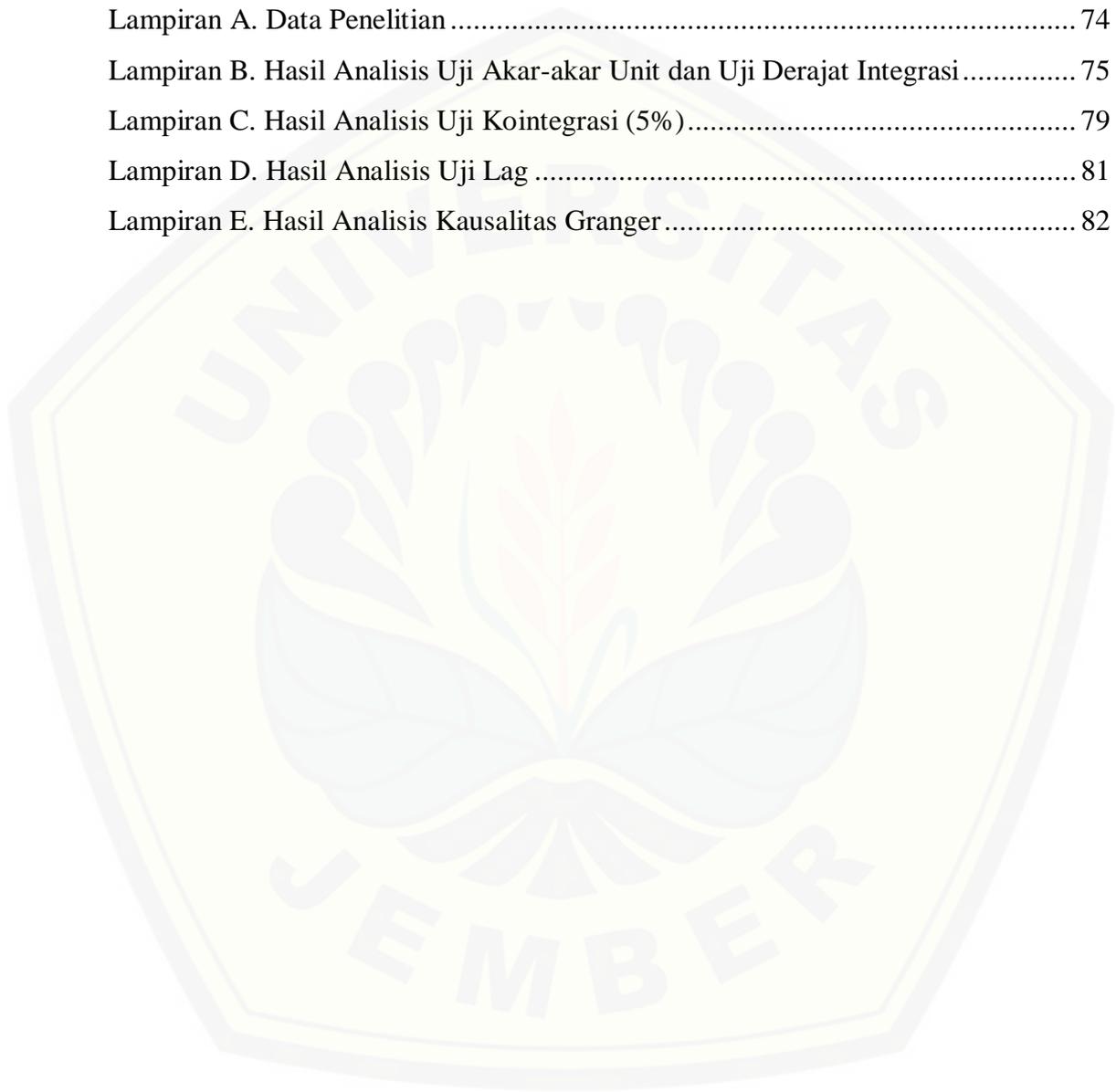
DAFTAR ISTILAH

FDI	: <i>Foreign Direct Investment</i>
GDP	: <i>Gross Domestic Product</i>
TRD	: <i>Trade</i>
GR	: <i>Gini Ratio</i>
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A. Data Penelitian	74
Lampiran B. Hasil Analisis Uji Akar-akar Unit dan Uji Derajat Integrasi.....	75
Lampiran C. Hasil Analisis Uji Kointegrasi (5%).....	79
Lampiran D. Hasil Analisis Uji Lag	81
Lampiran E. Hasil Analisis Kausalitas Granger	82





BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan bagi suatu negara, pembangunan ini secara terus menerus berlangsung untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi disuatu negara baik itu di negara maju maupun negara berkembang agar terciptanya pembangunan yang adil dan sejahtera. Pembangunan ekonomi pada umumnya dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya berbicara mengenai kenaikan pendapatan riil negara akan tetapi juga berbicara mengenai perbaikan sistem kelembagaan dan tatanan sosial yang mengacu pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Arsyad, 2010).

Pada era globalisasi saat ini semua negara di dunia menjalankan sistem perekonomian terbuka. Beragam upaya yang telah dilakukan di seluruh negara untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomiannya sehingga akan berdampak dalam sejahteranya masyarakat yang berada disuatu negara. Menurut kaum sosialis, dominasi pemerintah (perekonomian) dan minimalisasi hak kepemilikan masyarakat merupakan cara yang paling tepat dalam mengoptimalkan perekonomian dan meratakan kesejahteraan rakyatnya. Hal tersebut seperti yang diungkapkan Whittaker (dalam Deliarnov, 2012: 62) bahwa sistem ekonomi sosialis menunjukkan sistem pemilikan dan pemanfaatan sumber produksi (selain *labor*) secara kolektif. Sosialis bisa mencakup asosiasiasosiasi kooperatif maupun kepemilikan dan pengoperasian oleh pemerintah. Sementara Adam Smith, pencetus sistem ekonomi liberalis memiliki pendapat yang berlawanan dengan sistem ekonomi sosialis. Menurut Smith, Negara sama sekali tidak boleh mengatur perekonomian, melainkan menyerahkan segala sesuatunya pada *invisible hand*. Dalam sistem ekonomi liberalis, tiap individu diberikan keleluasaan yang besar dalam perekonomian (Deliarnov, 2012: 37). Paham liberalis tersebut didasarkan pada pemikiran Smith (dalam Deliarnov, 2012: 41)

bahwa walaupun setiap orang didorong untuk mengejar kepentingannya masing-masing, namun adanya persaingan bebas menjamin masyarakat secara keseluruhan akan menerima benefit sehingga akan tercapailah kesejahteraan umum (general welfare).

Perkembangan ekonomi dunia saat ini menunjukkan kecenderungan pemberlakuan sistem ekonomi liberalis, dimana hampir seluruh Negara di dunia mempraktekkan ajaran-ajaran ekonomi liberalis. Ajaran-ajaran ekonomi liberalis secara kolektif tercantum dalam Konsense Washington yang merupakan paket kebijakan racikan para ekonom liberalis Departemen Keuangan Amerika Serikat dan Dana Moneter Internasional (*IMF*) yang pada awalnya ditujukan untuk mengatasi krisis moneter di Amerika Latin pada tahun 1989. Namun pada dekade 1990-an banyak negara yang turut mengaplikasikan Konsense Washington sebagai upaya untuk mengatasi krisis moneter yang melanda negara-negara berkembang saat itu. Konsense Washington terdiri atas tiga gagasan utama: pertama, disiplin dalam urusan fiskal dan anggaran; kedua, ekonomi pasar, terutama hak cipta, nilai tukar mata uang yang kompetitif, privatisasi, dan deregulasi; ketiga, keterbukaan terhadap perekonomian global melalui liberalisasi perdagangan dan investasi langsung modal asing (Bremmer, 2011: 15). Dalam gagasan Konsense Washington tersebut disebutkan bahwa liberalisasi perdagangan dan liberalisasi finansial atau yang seringkali disebut sebagai keterbukaan perdagangan dan keterbukaan finansial juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian suatu negara.

Hasil kebijakan keterbukaan perdagangan dan keterbukaan finansial yang diterapkan negara-negara di dunia terlihat dari peningkatan tajam perdagangan dunia antara tahun 1980 hingga 2002 yang mencapai lebih dari tiga kali lipat. Sementara pada tahun 2000, investasi asing langsung modal asing sedunia mencapai 1,4 triliun dollar. (Deliarnov, 2012: 15). Keterbukaan telah mengantarkan negara-negara berkembang pada pertumbuhan ekonomi yang fantastis.

Indonesia sendiri pada tahun 80-an hingga pertengahan 90-an cenderung menggunakan sistem ekonomi campuran seperti yang digunakan di Jerman dan

Jepang, dimana Negara menyatu dan mengarahkan perekonomian liberalis yang baru tumbuh melalui proteksi dan subsidi (Deliarnov, 2012: 261). Namun mulai pertengahan 90-an Indonesia semakin memberi peran pada pasar dan mengurangi campur tangan pemerintah melalui deregulasi dan debirokratisasi.

Keterbukaan ekonomi dari sisi perdagangan di Indonesia terwujud pada bergabungnya Indonesia dengan organisasi perdagangan internasional, antara lain Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) pada 1989, dan World Trade Organization (WTO) pada 1994. Selain itu, Indonesia juga telah melaksanakan cukup banyak kerjasama perdagangan bebas, antara lain ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada 2002, ASEAN-China Free Trade Area (ACTFA) pada 2004, ASEANKorea Trade Area (AKFTA) pada 2007, Indonesia-Japan Economic Partnership pada 2007, ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA) pada 2010, dan ASEAN-Australia New Zealand Free Trade Area (AANFTA) pada 2012 (Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, 2013: 2). Kerjasama-kerjasama itu telah membuat keterbukaan ekonomi Indonesia dari sisi perdagangan meningkat cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1.1 perdagangan ekspor dan impor di Indonesia tahun 2015-2017, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Nilai Ekspor dan Impor dalam Milyar US\$ tahun 2015-2017

Negara	2015		2016		2017	
	Ekspor	Impor	Ekspor	Impor	Ekspor	Impor
Indonesia	12,12	11,10	12,73	11,50	15,24	14,24

(Sumber : BPS 2017, diolah).

Indonesia memiliki tingkat perdagangan internasional yang tinggi. Pada tahun 2017, ekspor dan impor mengalami peningkatan, nilai ekspor mencapai US\$15,24 milyar dan nilai impor mencapai US\$14,24 milyar. Nilai tersebut meningkat dari tahun 2015 dan tahun 2016, yaitu tahun 2015 nilai ekspor mencapai US\$12,12 milyar dan nilai impor mencapai US\$11,10 milyar. Sedangkan pada tahun 2016, nilai ekspor mencapai US\$12,73 milyar dan nilai impor mencapai US\$11,50 milyar.

Pada jangka waktu 3 tahun terakhir, dari tahun 2015 hingga tahun 2017, Indonesia mengalami peningkatan pada nilai ekspor dan impor. Rata-rata peningkatan nilai ekspor dalam jangka waktu tiga tahun terakhir mencapai 12,37% dan rata-rata peningkatan nilai impor dalam kurun waktu terakhir mencapai 13,71%. Dengan nilai ini membuat Indonesia menempati peringkat ke-194 untuk nilai ekspor dan impor tertinggi di dunia. Peningkatan nilai ekspor dan impor dilakukan bukan sekedar tanpa tujuan, namun seperti yang sudah dijelaskan, bahwa kegiatan perdagangan internasional memiliki kontribusi terhadap besarnya PDB dan secara tidak langsung PDB mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Selain keterbukaan ekonomi dari sisi perdagangan, Indonesia juga memberikan akses pada keterbukaan dari sisi finansial. Awal tonggak keterbukaan finansial Indonesia terjadi pada tahun 1967 dimana presiden Soeharto menerbitkan Undang-Undang No.1 tentang Penanaman Modal Asing/FDI. Pada tahun itu pula, konsensi pertambangan emas di Papua untuk Freeport McMoran diberikan. Setahun kemudian melalui UU No. 6 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, modal asing diperbolehkan masuk ke 7 sektor yang sebelumnya tidak boleh dikuasai asing (pelabuhan, kelistrikan, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api umum, pembangkit tenaga atom, dan media masa) dengan persyaratan saham asing tidak lebih dari 49 persen. Kebijakan ini kemudian meningkat pada tahun 1974, pihak asing dapat menguasai saham hingga 75 persen pada 7 sektor tersebut. Dan kembali meningkat melalui Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1994, investor asing dapat memiliki saham hingga 95 persen. Satu-satunya yang masih dilindungi dari modal asing adalah usaha media masa melalui UU No. 4 tahun 1982.

Kebijakan tersebut berdampak terhadap aliran penanaman modal asing/FDI yang masuk ke Indonesia. Seperti yang terlihat pada tabel 1.2 pergerakan nilai FDI mengalami fluktuatif, namun pada tahun 2010-2014 pergerakan nilai FDI terus meningkat. Pada tahun 2015 nilai FDI menurun sangat drastis. Namun, untuk keseluruhan nilai FDI tersebut, nilai FDI yang sangat tinggi terjadi pada tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2 FDI di Indonesia Tahun 2010-2017 (dalam US\$)

Tahun	FDI
2010	15292009411
2011	20564938227
2012	21200778608
2013	23281742362
2014	25120732060
2015	19779127977

Sumber: World Bank, 2019.

Dari tabel 1.2 tersebut FDI mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2015. Pada tahun 2015 nilai FDI sangat rendah dengan nilai 19779127977 US\$. Sehingga selisih antara tahun 2014 dengan 2015 yaitu dengan nilai 5341604083 US\$. Jadi penerunan dari tahun 2014 ke 2015 yaitu 5341604083 US\$. Menurut teori ekonomi Neoklasik berpendapat bahwa penanaman modal asing/ *foreign direct investment* (FDI) memiliki kontribusi yang positif terhadap pembangunan ekonomi *host country*. Modal asing yang dibawa ke *host country* akan digunakan untuk berbagai usaha sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Jika nilai FDI semakin menurun maka tidak dapat meratakan distribusi pendapatan namun berdampak menjadi ketimpangan.

Tabel 1.3 Koefisien Gini di Indonesia tahun 2010-2015

Tahun	Koefisien Gini
2010	1,561101384
2011	1,598790507
2012	1,597695186
2013	1,600972896
2014	1,595496222
2015	1,598790507

Sumber: World Bank, 2019.

Keterbukaan ekonomi baik dari sisi perdagangan maupun finansial yang diupayakan pemerintah Indonesia yaitu dengan harapan menciptakan kesejahteraan pada seluruh masyarakat Indonesia. Namun kesejahteraan dengan

mengupayakan keterbukaan ekonomi masih belum bisa tercapai karena kondisi ketimpangan pendapatan di Indonesia pergerakannya masih mengalami fluktuatif.

Pada tabel 1.3 koefisien gini mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 koefisien gini mengalami peningkatan dengan nilai 1,600972896. Namun pada tahun 2015 nilai koefisien gini meningkat kembali dari tahun 2014.

Fakta kecenderungan peningkatan ketimpangan pendapatan ini mengingatkan pada adanya dua pendapat yang berlawanan tentang pengaruh keterbukaan ekonomi terhadap ketimpangan. Menurut kaum neoklasik keterbukaan perdagangan akan mendorong pemerataan pendapatan sebagaimana pendapat Heckscher-Ohlin (Krugman dan Obstfeld, 2004: 95). Di lain sisi ada ekonom yang memiliki pandangan diluar *main-stream economiecs* seperti halnya kaum klasik dan neoklasik, kaum ini seringkali disebut kaum anti neoklasik atau penganut ilmu ekonomi radikal, mereka berpandangan bahwa keterbukaan perdagangan ini justru dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Tidak berbeda dengan keterbukaan perdagangan, dalam keterbukaan finansial juga terdapat perbedaan pendapat mengenai dampak keterbukaan finansial bagi host country. Teori ekonomi neoklasik menyatakan bahwa investasi asing langsung atau *foreign direct investment* (FDI) memiliki kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi host country. Sementara teori ketergantungan atau *dependency theory* secara diametral berlawanan dengan teori neoklasik, teori ini menyatakan bahwa FDI tidak menimbulkan makna apa pun bagi pembangunan ekonomi di host country, keberadaan FDI justru menindas pertumbuhan dan menimbulkan ketidakseimbangan pendapatan di host country. (Ardiansyah, 2014).

Berdasarkan uraian diatas, Indonesia mengalami perkembangan yang cukup tinggi dalam keterbukaan ekonomi baik dari sisi perdagangan dan sisi finansial, namun ketimpangan pendapatan mengalami fluktuasi dan mengalami peningkatan. Oleh karena itu menarik untuk mengetahui apakah memiliki korelasi keterbukaan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan dari beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah terdapat korelasi kausalitas antara perdagangan internasional terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?
2. Apakah terdapat korelasi kausalitas antara FDI terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat memiliki korelasi kausalitas antara Perdagangan Internasional dan ketimpangan pendapatan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat korelasi kausalitas antara (*foreign direct investment*) FDI dan ketimpangan pendapatan di Indonesia.

1.3 Manfaat Penelitian

1. Untuk pemerintah, mungkin bisa dijadikan pertimbangan ataupun masukan dalam memutuskan kebijakan yang hubungan dengan keterbukaan ekonomi agar dapat meratakan distribusi pendapatan di seluruh provinsi Indonesia.
2. Dari hasil penelitian ini mungkin dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat khususnya bagi para peneliti-peneliti yang tertarik untuk meneliti hal yang sama.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi yaitu permasalahan yang memiliki sifat multidimensional. Pembangunan ekonomi tidak hanya membahas aspek ekonomi, namun juga membahas aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan ekonomi secara umum merupakan suatu proses yang disebabkan dari kenaikan pendapatan riil per-kapita penduduk di suatu negara dalam jangka panjang yang disertai dengan adanya perbaikan sistem dalam kelembagaan, (Arsyad, 2010).

Negara berkembang memiliki beberapa permasalahan dalam pembangunan ekonomi, sebagai berikut: a) sumber modal manusia yang rendah; b) tingginya tingkat ketimpangan maupun kemiskinan; c) tingginya pertumbuhan penduduk; d) besarnya fraksionalisasi sosial; e) jumlah penduduk desa yang sangat besar akan tetapi tingkat migrasi dari desa ke kota sangat cepat; f) rendahnya tingkat industrialisasi maupun ekspor barang; g) terhambatnya kondisi geografis; h) memiliki pasar yang tidak maju; i) memiliki dampak kolonial yang tersisa dan hubungan internasional yang tidak setara (Todaro dan Smith, 2011).

Terdapat indikator yang diperlukan untuk perbandingan dalam kesejahteraan wilayah maupun agar mengenal potensi corak pembangunan dari masing-masing wilayah tersebut. Dalam Indikator sebagai berikut: a) indikator moneter, yang merupakan komponen pendapatan per-kapita maupun kesejahteraan ekonomi Bersih; b) indikator non moneter, yang merupakan Indikator Sosial maupun Indeks Kualitas Hidup (IHK); c) indikator campuran, yang merupakan Indikator Susenas Inti maupun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Arsyad, 2010).

Pembangunan ekonomi akan lebih maju atau meningkat apabila laju pertumbuhan di masing-masing wilayah meningkat. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan hasil produksi (output) perkapita selama dalam waktu jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi mendorong tiga aspek, yaitu proses,

hasil dari produksi perkapita dan jangka panjang. Berikut adalah teori pertumbuhan ekonomi menurut para ahli.

a) Teori Adam Smith

Menurut Smith, terdapat empat tahap dalam peradaban manusia, sebagai berikut: 1) tahap pemburuan; 2) tahap dalam perternakan; 3) tahap bercocok tanam; 4) tahap perdagangan.

Smith juga memfokuskan pada luas pasar untuk menopang hasil produksi agar menarik untuk melakukan perdagangan antar luar negeri. Dengan begitu pasar akan menjadi lebih luas dengan adanya pasar domestik maupun pasar luar negeri.

b) Teori Arthur Lewis

Menurut model pembangunan Lewis, negara yang memiliki perekonomian terbelakang memiliki dua sektor sebagai berikut: 1) sektor non modern atau tradisional; 2) sektor modern atau industri.

Hal utama dari model ini mengarahkan pada proses pengalihan tenaga kerja, maupun pertumbuhan hasil produksi (output) serta mengembangkan tenaga kerja dalam sektor modern. Dengan peningkatan output dapat pengalihan tenaga kerja maupun pertumbuhan kesempatan kerja dalam sektor modern.

Lewis menunjukkan pembangunan yang seimbang antara sektor produksi untuk kebutuhan domestik maupun untuk kebutuhan luar negeri. Dengan begitu Untuk, perekonomian dapat dibedakan menjadi tiga sektor yaitu pertanian (P), industri (I) dan ekspor (X) (Arsyad, 2010).

Peningkatan sektor Industri (I) dapat dilakukan dengan meningkatkan permintaan dalam barang-barang pertanian (P). Jika meningkatnya sektor I disebabkan substitusi impor, maka devisa dapat dihemat dengan cara mengimpor barang-barang P. Namun jika peningkatan sektor I bukan disebabkan dari substitusi impor dan sektor P tidak ada peningkatan, maka harga-harga barang P ataupun impor akan meningkat sehingga menyebabkan defisit dalam neraca pembayaran. Defisit neraca pembayaran dapat juga dihindari jika sektor ekspor (X) negara tersebut meningkat sebagai dapat menyeimbangkan kenaikan impor. Oleh sebab itu, perningkatan sektor I tanpa diikuti oleh peningkata sektor P hanya

akan berlaku apabila sektor X juga mengalami peningkatan. Peningkatan sektor P tanpa diikuti oleh peningkatan sektor I juga akan berlangsung jika sektor X juga mengalami peningkatan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan dalam peran ekspor menurut Lewis, sebagai berikut: a) menjamin keberlangsungan dalam pembangunan jika pembangunan dapat seimbang dengan sektor-sektor domestik, yaitu pertanian dan industri, sebagai pemicu dalam peningkatan sektor domestik karena dapat menciptakan permintaan barang-barang yang dapat dihasilkan dari sektor domestik; b) menyelesaikan permasalahan dalam keterbatasan di pasar domestik; c) dapat memperluas pembangunan ekonomi karena mungkin dalam peningkatan untuk sektor impor dapat memperluas jumlah maupun berbagai jenis barang-barang dalam masyarakat.

Walaupun sektor ekspor lebih menguntungkan namun dengan mudah juga dapat meningkat, namun Lewis mengingatkan pula dalam sebuah pembangunan jangan terlalu mengembangkan satu sektor ekspor saja. Namun dalam pemusatan pembangunan pada sektor ekspor menimbulkan faktor eksternalitas bagi masyarakat dengan nilai tukar (*term of trade*) yang tidak menguntungkan.

c) Teori Frederich List

Menurut teori List, perkembangan ekonomi memiliki lima tahapan berdasarkan dengan cara produksi, yakni: 1) tahap pemburuan, 2) tahap berternak, 3) tahap agraris, 4) campuran dalam tahap bertani, industri manufaktur dan perdagangan dalam bentuk sederhana, 5) campuran dalam tahap bertani, industri manufaktur dan perdagangan yang lebih maju (Arsyad, 2010).

Menurut List, sistem perdagangan bebas (*free trade*) yang telah disampaikan oleh kaum klasik hanya dapat diterapkan untuk beberapa negara dalam tahap kelima yaitu untuk meningkatkan perekonomian dalam masyarakat, dalam pola-pola industri manufaktur maupun dalam perdagangan sudah memiliki kemajuan. Solusi yang telah List ditawarkannya adalah harus memiliki perlindungan bagi industri lokal agar dapat memiliki daya saing secara global.

d) Teori Gunnar Myrdal

Myrdal mengemukakan pendapatnya bahwa pembangunan ekonomi dapat memiliki keuntungan dari proses sirkuler dimana negara yang sudah maju akan memiliki keuntungan yang semakin melimpah, dan negara terbelakang tidak memiliki keuntungan atau pembangunan ekonomi negara tersebut semakin terhambat. Dari dampak balik (*backwash effects*) cenderung meluas dan dampak sebar (*spread effects*) cenderung menyempit. Secara kumulatif berdampak dalam ketimpangan internasional serta terjadinya ketimpangan regional di dalam setiap negara yang terbelakang (Jhingan, 2012).

Dampak balik (*backwash effect*) adalah dimana keadaan untuk pembangunan negara-negara yang telah maju dapat menghambat negaraa yang ingin maju atau berkembang (Arsyad, 2010). Ada beberapa faktor terjadi dampak balik (*backwash effects*) yaitu: 1) perpindahan penduduk dari negara terbelakang berpindah ke negara yang lebih maju; 2) aliran modal yang besar di negara maju dari pada negara terbelakang, 3) negara maju yang memiliki jaringan transportasi yang sangat bagus. Sedangkan dampak sebar (*spread effects*) adalah dimana keadaan negara maju dalam pembangunan dapat percepatan pembangunan di negara yang terbelakang. Hal tersebut dapat menaikkan permintaan atas produksi dari negara terbelakang untuk negara maju. Dari produksi negara terbelakang tersebut berbentuk bahan baku industri yang dibutuhkan oleh negara maju.

Myrdal kemudian muncul gagasan tentang teori keterbelakangan dan pembangunan ekonomi yang diperoleh dari pemikiran ketimpangan regional dan internasional yang dapat dijelaskan dari dampak balik (*backwash effects*) dan dampak sebar (*spread effects*). Berikut adalah penjelasannya:

1) Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan regional yang dimaksudkan disini adalah ketimpangan taraf nasional yang memiliki karekteristik, yaitu sebagai berikut: a) ketimpangan regional berhubungan dengan sistem kapitalis. Motif laba yang dikendalian oleh sistem kapitalis hanya dapat berkembang pada pembangunan pusat di wilayah yang memiliki keuntungan yang lebih besar. b) pasar bebas kemungkinan memperluas ketimpangan regional. Perdagangan memiliki segi positif bagi negara maju yaitu dengan laba yang lebih besar, dan negara terbelakang hanya

mendapatkan kerugian. Kebebasan maupun perluasan dalam pasar dapat memberikan keuntungan daya saing pada industri di setiap pengembangan sentra-sentra yang lebih mapan. c) perpindahan modal kemungkinan dapat terjadinya peningkatan dalam ketimpangan regional. Konsentrasi kegiatan ekonomi dapat memberikan keuntungan di negara maju dan terjadi penekan dalam kegiatan ekonomi di negara terbelakang. Di negara maju, dengan permintaan yang meningkat dapat meningkatkan investasi sehingga dapat meningkatkan pendapatan.

2) Ketimpangan Internasional

Secara umum, ketimpangan internasional memiliki persamaan dengan ketimpangan regional. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: a) perdagangan hanya menguntungkan negara maju dan hanya merugikan negara terbelakang. Dengan basis industri dan daya sebar yang sangat besar di negara maju, kemudian mengekspor barang industri yang lebih murah ke negara terbelakang sehingga terus-menerus dapat mematikan industri kecil serta industri kerajinan tangan di negara yang terbelakang. Hal tersebut kemungkinan dapat merubah negara terbelakang menjadi negara eksportir barang primer sehingga lambat laun dapat mengakibatkan fluktuasi dengan harga yang menggila karena menyebabkan permintaan dengan berbagai macam barang ekspor yang inelastis; b) perpindahan modal tidak dapat menghapus ketimpangan internasional. Aliran modal lebih banyak masuk ke negara maju dari pada negara terbelakang karena negara maju lebih menjanjikan keuntungan serta terdapat penjaminan kerugian untuk pelaku investor. Sedangkan negara terbelakang kemungkinan dapat merugikan perekonomian bagi para investor dan belum tentu menjamin apabila terjadi kerugian karena adanya dampak balik yang sangat besar. Hal tersebut pula pada setengah bagian besar aliran modal ditujukan pada produksi primer dan ekspor. Oleh karena itu perdagangan maupun perpindahan modal dapat meningkatkan perekonomian di negara maju dan negara terbelakang berdampak balik dari negara maju sehingga perekonomiannya semakin terpuruk bagi negara terbelakang.

2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori Schumpeter (1934) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perubahan spontan dan terputus-putus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya. Pembangunan ekonomi mengacu pada masalah negara berkembang, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan, pendapatan dan pertumbuhan ekonomi mengacu kepada masalah negara maju.

Menurut Tarigan (2004) pertumbuhan ekonomi wilayah adalah penambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Hal itu juga menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di wilayah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja dan teknologi) yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta diwilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi transfer-payment yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana di luar wilayah.

2.1.3 Teori Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan adalah dimana distribusi pendapatan yang didapatkan dari seluruh penduduk yang ada disuatu negara yang memiliki distribusi pendapatan yang tidak sama atau tidak merata. Ketimpangan pendapatan yang mengarahkan dengan meratanya pendapatan distribusikan di berbagai populasi. Ketimpangan pendapatan juga menunjukkan dengan kesenjangan dengan wilayah yang lebih maju dengan wilayah terbelakang.

Secara teoritis persoalan ketimpangan dalam pembangunan diperkenalkan oleh Douglas C North dalam hipotesis yang dapat kenal sebagai *Hipotesis Neo-Klasik*. Menurut hipotesis tersebut pada saat dimulainya proses dalam pembangunan, memiliki kecenderungan meningkatkan ketimpangan pendapatan. Dalam proses tersebut ketimpangan akan terus meningkat sampai berada di titik

puncak. Lalu, jika dalam proses pembangunan berkelanjutan, sedikit demi sedikit ketimpangan di beberapa wilayah lambat laun semakin menurun. Berdasarkan hipotesis tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa di beberapa negara yang berkembang ketimpangannya cenderung tinggi, sedangkan di beberapa negara maju kecenderungan dapat meratakan distribusi pendapatan.

Menurut John Rawls (dalam Tadaro dan Smith, 2006:236), pakar ekonomi menunjukkan eksperimennya, bahwa dari berbagai orang juga memilih negara dengan tingkat ketimpangan tertentu. Hal tersebut pada dasarnya setiap orang tidak berkeinginan berada di suatu posisi terbelakang dengan kondisi yang dimiliki negara dengan ketimpangan yang lebih tinggi, namun juga negara yang terus meningkat sehingga pemerataan menjadi sempurna tidak memiliki dorongan untuk berkerja keras dan inovasi-inovasi akan hilang.

Berdasarkan penjabaran tersebut bahwa pada suatu negara tidak juga harus mencapai pemerataan distribusi pendapatan yang sempurna dalam mensejahterakan masyarakatnya, karena tugas negara hanya untuk mengendalikan agar tingkat ketimpangan tidak terus meningkat. Negara dapat mengendalikan tingkat ketimpangan pendapatan dengan cara mengendalikan dari beberapa faktor yang menjadi penyebab tingginya tingkat ketimpangan.

Ada beberapa penyebab terjadinya ketimpangan di negara berkembang menurut Adelman & Morris (dalam Arsyad, 2010:283-284) yaitu: a) jumlah masyarakat yang semakin meningkat juga dapat menurunkan pendapatan perkapita; b) terjadinya inflasi, dimana permintaan atas uang pendapatan akan terus meningkat namun tidak diikuti juga secara proposional dengan menambah berbagai produksi; c) tidak meratanya pembangunan di setiap wilayah; d) dengan investasi yang melimpah dari berbagai macam proyek dapat dijadikan padat modal (*Capital Intensive*). e) kebijakan industri substitusi impor yang menyebabkan naiknya berbagai harga barang dari hasil industri untuk melindungi usaha-usaha dari kapitalis; f) buruknya nilai tukar (*term of trade*) bagi negara berkembang dalam perdagangan dengan negara yang lebih maju, sehingga menyebabkan tidakelastisan permintaan terhadap ekspor negara berkembang; g) melemahnya industri kerajinan dalam masyarakat.

Untuk mengukur distribusi pendapatan dapat dijadikan dua ukuran pokok, yaitu sebagai berikut (Tadaro dan Smith, 2006: 234):

- a) Distribusi pendapatan perseorangan atau distribusi ukuran pendapatan. Para ahli sering menggunakan sistem distribusi ini. Dalam pengukuran ini secara langsung menghitung keseluruhan dalam pendapatan yang telah diterima pada setiap individu atau rumah tangga namun sumbernya diabaikan. Lalu membagi total keseluruhan populasi menjadi sejumlah kelompok atau ukuran sesuai dengan tingkat pendapatan yang diterima dan menetapkan berapa proporsi yang diterima oleh berbagai kelompok dari total keseluruhan pendapatan nasional.
- b) Distribusi pendapatan fungsional atau pangsa distribusi pendapatan per-faktor produksi. Sistem distribusi ini fokus pada total pendapatan nasional yang diperoleh dari setiap faktor produksi (lahan, tenaga pekerja serta modal) namun dasarnya mempermasalahkan presentase pendapatan atau laba tenaga kerja dari keseluruhan juga dapat membandingkan presentase penghasilan total dibagi dalam bentuk sewa, bunga, juga laba.

Indeks yang sering digunakan sebagai proksi dari tingkat ketimpangan yaitu indeks gini, indeks Williamson, maupun indeks entropi Theil. Indeks gini mengukur tingkat ketimpangan secara keseluruhan dengan melihat jumlah pengeluaran yang dikeluarkan oleh penduduk di suatu negara. Indeks Williamson dan indeks entropi Theil lebih menitikberatkan mengukur tingkat ketimpangan di berbagai wilayah. Dalam penelitian ini indeks yang akan digunakan dalam mengukur tingkat ketimpangan adalah indeks gini. Penggunaan indeks gini dalam penelitian ini didasarkan pada fokus dari penelitian ini yang akan meneliti tingkat ketimpangan secara keseluruhan.

Koefisien Gini dirumuskan pertama kali oleh ahli statistik Italia pada tahun 1912. Menurut Arsyad (2011: 290-291), koefisien gini adalah suatu ukuran dengan tingkat mengenai derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam suatu negara. Ukuran ketidakmerataan agregat berkisar antara 0 (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna).

Menurut Arsyad (2010: 291), secara matematis rumus Koefisien Gini sebagai berikut (Arsyad, 2010: 290):

$$KG = 1 - \sum_{i=1}^n (X_{i+1} - X_i) (Y_{i+1} - Y_i)$$

Keterangan:

KG : Koefisien Gini

X_i : Proporsi jumlah rumah tangga kumulatif dalam kelas i

F_i : proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas i

Y_i : Proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif dalam kelas i

2.1.4 Teori Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk disuatu negara dengan negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.

Namun apabila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, perdagangan internasional lebih rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut disebabkan karena adanya batas-batas politik dan kenegaraan yang dapat menghambat perdagangan, misalnya dengan adanya bea, tarif, atau kuota barang impor. Selain itu, kesulitan lainnya timbul karena adanya perbedaan budaya, bahasa, mata uang, dan hukum dalam perdagangan (Hasoloan 2013).

Perdagangan internasional tentu memiliki manfaat yang akan didapatkan oleh tiap-tiap negara yang melakukan kegiatan tersebut. Manfaat tersebut antara lain seperti memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri, memperluas pasar dan menambah keuntungan, dan terjadinya transfer teknologi modern. Perdagangan internasional terjadi juga karena adanya faktor pendorong baik faktor dari dalam maupun dari luar negara seperti untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, adanya perbedaan keadaan SDA maupun SDM serta iklim, dan adanya kesamaan selera terhadap suatu barang.

Suatu gagasan yang mengenai pentingnya perdagangan internasional bagi perekonomian suatu negara dicetuskan pertama kali oleh Adam Smith melalui tulisannya pada tahun 1776, Smith menyatakan bahwa “pembagian tenaga kerja dibatasi oleh besarnya pasar:. Semakin besar pasar yang akan menjadi tujuan pemasaran barang maupun jasa, maka semakin besar pula keuntungan yang didapatkan dari perdagangan dan pembagian tenaga kerja (Todaro & Smith, 2006: 81). Ada cukup banyak para ekonom yang mengungkapkan teori tentang perdagangan internasional, diantaranya adalah teori klasik (Adam Smith, David Ricardo) dan teori neoklasik (Haberler dan Heckscher-Ohlin). Selain itu Boediono (2011: 72-73) yang menjelaskan juga tentang pandangan lain dari perdagangan internasional atau yang sering disebut Ilmu Ekonomi Radikal. Berikut adalah teori perdagangan internasional menurut teori klasik dan teori modern (neo-klasik) :

a. Teori Klasik

1) Absolute Advantage

Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith. Dalam teori ini Adam Smith (Sattar, 2017:39) mengungkapkan bahwa setiap negara dapat memperoleh manfaat dari perdagangan internasional (*gain from trade*) dengan melakukan spesialisasi produksi dalam melakukan perdagangan melalui ekspor apabila memiliki keunggulan mutlak.

Teori *absolut advantage* didasarkan pada asumsi seperti pendapatan Sattar (2017:39) didalam bukunya, yaitu: a) faktor produksi yang digunakan hanya tenaga kerja. b) kualitas barang yang diproduksi kedua negara sama. c) pertukaran dapat dilakukan secara barter ataupun tanpa uang. d) tidak ada biaya transportasi.

2) Comparative Advantage

Teori ini dikemukakan oleh J.S Mill menyatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor barang yang mempunyai comparative advantage terbesar kemudian mengimpor barang yang mempunyai comparative disadvantage, yakni suatu barang yang lebih murah ketika memilih untuk mengimpor karena jika memproduksi sendiri maka akan mengeluarkan biaya produksi yang tinggi (Sugianto, 2008:24). Pada dasarnya teori ini beranggapan bahwa nilai suatu barang dinilai dari banyaknya tenaga kerja yang digunakan,

semakin banyak tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi maka akan menyebabkan harga semakin mahal.

3) *Comparative Cost*

Teori *Comparative Cost* atau biaya relatif dikemukakan oleh David Ricardo. Dalam teori ini menyatakan bahwa nilai atau value dari suatu barang tergantung dari banyaknya tenaga kerja untuk memproduksi suatu barang tersebut (*labor value theory*). Menurut teorinya perdagangan antar negara akan timbul apabila dari masing-masing negara memiliki *comparative cost* yang sangat kecil.

b. Teori Modern (Neo-Klasik)

1) Keunggulan Komparatif (*Comparative Advantage*) dari Haberler

Berbeda dengan teori klasik yang memiliki perbedaan biaya produksi suatu barang yang sama hanya dari pemakaian tenaga kerja. Maka menurut Haberler mengatakan bahwa harga barang dipasaran bukan hanya disebabkan pemakaian faktor produksi tenaga kerja namun merupakan kombinasi pemakaian faktor produksi (tanah, tenaga kerja, dan kapital). Karena hal itu Haberler menggunakan konsep *opportunity cost* yang dijelaskan dengan *possibility curve* dan *indifference curve* untuk melihat terjadinya perdagangan antar dua negara serta melihat keuntungan dari perdagangan internasional yang terjadi.

2) Keunggulan Komparatif (*Comparative Advantage*) dari Heschler-Ohlin (H-O)

Menurut teori Heckscher-Ohlin atau teori HO (Apridar, 2012: 102), perdagangan antar negara terjadi karena, yaitu adanya perbedaan jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki (*endowment factors*) dari masing-masing negara. Setiap negara yang memiliki faktor produksi yang relatif banyak/murah dalam memproduksinya lalu melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tersebut. Sebaliknya, setiap negara akan mengimpor barang tertentu bila negara tersebut memiliki faktor produksi yang langka/mahal dalam memproduksinya. Dengan adanya spesialisasi dan pembagian kerja antar negara berkembang dan negara maju dalam perdagangan internasional, maka dapat diharapkan setiap negara mendapatkan keuntungan perdagangan yang optimal.

Selain menjelaskan mengenai faktor yang mendorong terjadinya perdagangan antar negara, Heckscher-Ohlin juga menjelaskan dengan kaitan

perdagangan internasional dengan distribusi pendapatan. Menurut Heckcher-Ohlin (Krugman dan Obstfeld, 2004: 95) perdagangan internasional akan membuat para pemilik faktor-faktor produksi yang melimpah di suatu negara akan memperoleh keuntungan dari adanya hubungan perdagangan, namun para pemilik faktor-faktor produksi yang langka di suatu negara sebaliknya akan mengalami kerugian dari terselanggarnya perdagangan. Dengan demikian tingkat ketimpangan pendapatan antara pemilik faktor-faktor produksi langka dan melimpah di suatu negara bisa menurun.

c. Pengukuran Keterbukaan Perdagangan

Menurut pendapat Balanika (2007), perdagangan dan liberalisasi perdagangan merupakan dua konsep yang berhubungan yang tidak sama. Liberalisasi perdagangan mencakup kebijakan yang dilakukan agar meningkatkan keterbukaan perdagangan. Sedangkan keterbukaan perdagangan pada umumnya dianggap sebagai skala sektor perdagangan sebuah negara yang dihubungkan dengan total output. Akhir-akhir ini, pengertian keterbukaan menjadi gagasan yang identik dengan adanya perdagangan bebas.

Membagi pengukuran keterbukaan perdagangan dan kebijakan perdagangan yang terbagi dalam 6 kelompok (David, 2007), yaitu sebagai berikut:

1) Rasio perdagangan

$$\text{Keterbukaan perdagangan} = \frac{\text{Ekspor} + \text{Impor}}{\text{PDB}} \times 100\%.$$

2) Penyesuaian aliran perdagangan

Dalam penyesuaian aliran perdagangan menggunakan perbedaan aliran perdagangan aktual dan prediksi aliran perdagangan bebas agar membentuk langkah-langkah dalam kebijakan perdagangan.

3) Pengukuran atas dasar harga

Digunakan agar dapat melihat kebijakan perdagangan dengan mencari perubahan harga pada barang-barang pasar (dalam perbandingan harga internasional) ataupun dalam mata uang (pasar gelap premium).

4) Tarif

Merupakan indikator langsung yang dapat melihat restriksi perdagangan, indeks yang digunakan dalam perdagangan antara lain rata-rata tarif sederhana (*simple tariff average*), rata-rata tarif perdagangan berkualitas (*trade-weight tariff average*), pendapatan cukai sebagai persentase dari total perdagangan (*revenue from duties as a percentage of total trade*) maupun tingkat proteksi efektif (*effective rate of protection*).

5) Hambatan non tarif

Hambatan non tarif ini seperti kouta impor, pengendalian ekspor, akuisisi pemerintah, restriksi perdagangan jasa.

6) Indeks gabungan

Pengukuran keterbukaan perdagangan dalam lima variabel, yaitu sebagai berikut:

a) rasio perdagangan; b) tingkat tarif rata-rata; c) tingkat tarif efektif; d) globalisasi ekonomi; dan e) globalisasi keseluruhan (Jalil, 2012).

Dari banyaknya cara pengukuran keterbukaan perdagangan, dalam penelitian ini menggunakan rasio perdagangan agar mendapatkan variabel keterbukaan perdagangan.

2.1.5 Liberalisasi Perdagangan di Indonesia

Pada abad ke-5 Masehi Indonesia mampu turut serta dalam perdagangan maritim Internasional Asia. Perkembangan ini didorong oleh perkembangan teknologi transportasi pelayaran. Terlebih lagi dengan munculnya kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Singasari dan Majapahit, kapal-kapal yang dibuat menjadi semakin besar dan dapat menjangkau jarak yang lebih jauh lagi.

Bird, Hill dan Cuthberstone (2008) berpendapat bahwa jika diamati dengan baik, sesungguhnya Indonesia diciptakan Tuhan untuk perdagangan bebas. Hal ini yang terkait dengan status Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan perbatasan yang keropos, terdiri dari 13.000 pulau, terdapat pemabalakan liar, dan berdekatan dengan perdangan bebas Singapura maupun jalur laut internasional utama selat Malaka. Meskipun demikian, bandul dalam kebijakan perdagangan Indonesia telah berayun selama lebih dari 60 tahun, dari yang

awalnya sebagai negara dengan perdagangan terpencil menjadi negara dengan rezim yang sangat terbuka.

Sejak tahun 1960, terjadi perubahan yang besar dalam kebijakan perdagangan Indonesia. Pada tahun 1965, Indonesia melepaskan diri dari perdagangan bebas, investasi dan utang dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), *International Monetary Fund* (IMF) dan *World Bank*. Kerusuhan dalam politik tahun 1965-1966 mengantarkan pergeseran ekonomi Indonesia menuju stabilisasi perekonomian dengan cepat dan efektif, serta kebijakan perdagangan yang terbuka.

Menurut Tambunan (2006), sejak awal orde baru hingga awal dekade 80-an, pemerintah menerapkan strategi substitusi impor, atau sering disebut juga dengan strategi berorientasi ke dalam (*inward looking*). Perekonomian yang berorientasi ke dalam biasanya anti investasi asing dan menerapkan rezim perdagangan luar negeri yang juga restriktif. Strategi ini dimaksudkan agar mendorong perkembangan industri domestik secara sengaja dengan tempo yang cepat untuk menggantikan barang-barang impor. Cara ini juga dapat diharapkan bisa mengurangi ketergantungan ekonomi domestik terhadap barang-barang impor dan untuk selanjutnya dapat memperbaiki neraca perdagangan yang dapat berarti juga mengurangi pemborosan dalam pemakaian cadangan devisa.

Namun, pada awal dekade 80-an, setelah *oil boom* kedua berakhir dan harga minyak di pasar dunia cenderung menurun, strategi *inward looking* ini diganti secara bertahap dengan strategi yang berorientasi ke luar (*outward looking*). Dengan strategi ini, negara biasanya menerapkan strategi promosi ekspor sebagai motor utama penggerak proses industrialisasinya. Kebijakan *outward looking* ini sering diidentikkan dengan perdagangan bebas. Pergeseran strategi ini diawali dengan penurunan beberapa tarif impor dan penghapusan sejumlah peraturan yang selama itu dapat menghambat kegiatan-kegiatan ekspor.

Selain itu juga, pada bulan Desember 1984 terdapat peralihan penggunaan APE (Angka Pengenal Ekspor) atau APES (APE Sementara). Kegiatan ekspor yang sebelumnya hanya terbatas pada wilayah-wilayah tertentu, kini beralih

menjadi seluruh wilayah Republik Indonesia. Sehingga ekspor juga dapat dilakukan oleh masyarakat dari seluruh wilayah di Indonesia.

Selanjutnya juga terdapat dari beberapa kebijakan perdagangan selama dilaksanakannya Program Lima Tahun (PELITA) IV (Mukhyi, 2011). Kebijakan-kebijakan tersebut, sebagai berikut:

1) Kebijakan Inpres No. 5 tahun 1985

Bermanfaat dalam meningkatkan ekspor non migas dan pengurangan biaya tinggi dengan pemberantasan pungli, mempermudah prosedur kepabeanan dan menghapus dan memberantas biaya siluman (biaya yang dikeluarkan secara tidak resmi dan tidak bertanda terima).

2) Paket Kebijakan 6 Mei (PAKEM) 1986

Bermanfaat untuk mendorong sektor swasta dalam bidang ekspor dan penanaman modal.

3) Paket Kebijakan 25 Oktober 1986

Ini berupa deregulasi bidang perdagangan, moneter, dan penanaman modal dengan cara penurunan bea masuk impor untuk komoditi bahan penolong dan bahan baku, proteksi produksi yang lebih efisien dan kebijakan penanaman modal.

4) Paket Kebijakan 15 Januari 1987

Ini berupa peningkatan dalam efisiensi, inovasi dan produktivitas dari beberapa sektor industri (menengah ke atas) agar dapat meningkatkan ekspor non migas. Adapun langkah-langkahnya antara lain dengan penyempurnaan dan penyederhanaan ketentuan impor, pembebasan dan keringanan bea masuk dan penyempurnaan klasifikasi barang.

Perdagangan internasional di Indonesia juga berkembang menjadi perkembangan bebas sejak pemerintah orde baru mengeluarkan deregulasi paket kebijaksanaan 21 November 1988 (PAKNOV). PAKNOV ini disebut-sebut juga sebagai cikal bakal masuknya perdagangan bebas di Indonesia. Secara garis besar, PAKNOV berisi mengenai pengikisan berbagai rintangan di sekitar arus distribusi barang dan angkutan laut, pemudahan distribusi arus barang produk pabrik-pabrik modal asing, penurunan bea masuk bahan baku plastik dari 30-60% menjadi 5%.

Melalui paket November ini pula pemerintah membat 26 jenis tarif pos (Tempo, 1997).

PAKNOV pada intinya juga menetapkan ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan untuk menunjang kelancaran distribusi barang di dalam negeri serta untuk kelancaran ekspor non migas, di samping itu juga usaha-usaha untuk meningkatkan efisiensi produksi nasional serta peningkatan produktivitas nasional, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan investasi. Berikut adalah pokok-pokok kebijakan PAKNOV (Halwani, 2010): 1) penyempurnaan tata niaga impor barang; 2) deregulasi dibidang perdagangan, industri dan pertanian; 3) pemberian kemudahan untuk produksi ekspor; 4) deregulasi dalam bidang perhubungan laut.

Dengan demikian juga, Tambunan (2006) menambahkan bahwa selama dekade 90-an, sebelum krisis, pemerintah kembali mengeluarkan bermacam kebijakan reformasi di bidang perdagangan eksternal dan investasi termasuk paket deregulasi pada bulan Juni 1991. Dalam paket ini *Non Tariff Barriers* (NTBs) dikurangi lagi dan diganti dengan tarif dan pajak ekspor, tingkat-tingkat tarif umum dikurangi, dan beberapa areal bisnis/industri dibuka kembali bagi investasi swasta/asing yang dari sebelumnya masuk dalam daftar negatif.

Menurut Carunia, dkk (Tambunan, 2006) paket di atas diikuti oleh suatu seri dari reformasi perdagangan dan investasi pada bulan Juli 1992, Juni dan Oktober 1993, Juni 1994, Mei 1995, dan Juni 1996. Elemen-elemen utama dari paket-paket ini merupakan suatu rangkaian dari penurunan-penurunan tarif, perubahan-perubahan dalam pengaturan-pengaturan perdagangan untuk komoditas-komoditas tertentu (penghapusan dari NTBs), penyempurnaan fasilitas-fasilitas perdagangan seperti skim pengembalian bea masuk dan prosedur-prosedur dalam zona terbatas, dan kekurangan dari daftar-daftar dari kegiatan-kegiatan yang tertutup bagi investasi swasta/asing.

Indonesia kemudian mengikuti perjanjian perdagangan bebas pada tahun 1989 berupa *Organization of the Petroleum Exporting Countries* (OPEC), yang kemudian disusul dengan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) pada tahun 1993, *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) pada tahun 1994, *World Trade*

Organization (WTO) pada tahun 1995 (Halwani, 2010). Belum lagi menurut Ardiansyah (2014), terdapat anak tambahan dari AFTA berupa *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA), *ASEAN-Korea Free Trade Area* (AKFTA), *ASEAN-India Free Trade Area* (AIFTA), *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (AANZFTA) dan *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership* (AJCEP). Pada tahun 2015 pun Indonesia mulai memasuki era *ASEAN Economic Community* (AEC) dimana terciptanya pasar bebas di bidang permodalan, barang dan jasa, serta tenaga kerja sebagai tindak lanjut dari AFTA (nationalgeographic, 2015).

Bagi Indonesia, menolak ikut serta dalam suatu perjanjian perdagangan bukanlah merupakan sebuah pilihan. Indonesia dapat kehilangan kesempatan untuk bertransaksi dengan tarif rendah dengan negara-negara anggota perjanjian perdagangan tersebut. Selain itu keterlibatan Indonesia dalam perjanjian perdagangan internasional sebenarnya juga dapat membantu Indonesia dalam menjalankan usaha-usaha pembangunan melalui promosi serta pengutamaan sektor-sektor ekonomi yang unggul. Maka dari itu, pemerintah juga perlu merumuskan dan menerapkan kebijakan internasional yang berorientasi ke luar yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi.

2.1.6 Foreign Direct Investment (FDI)

Foreign Direct Investment (FDI) merupakan proses dimana pelaku ekonomi, individu maupun kelompok/perusahaan dari suatu negara memperoleh kepemilikan aset dengan tujuan untuk mengontrol produksi, distribusi, dan aktivitas lainnya dari suatu perusahaan di negara lain (Moosa 2002). Dengan begitu *Foreign Direct Investment* (FDI) merupakan perpindahan modal dari satu negara ke negara lain. Aliran modal ini biasanya berupa investasi riil dalam bentuk pendirian perusahaan, pembangunan pabrik, pembelian barang dan modal, tanah, bahan baku, dan tenaga kerja.

Menurut Alan M. Rugman berpendapat bahwa penanaman modal asing atau *Foreign Direct Investment* (FDI) dipengaruhi oleh variabel lingkungan dan variabel internal. Tiga jenis variabel lingkungan yang menjadi perhatian yaitu:

ekonomi, non ekonomi, dan pemerintah. Variabel ekonomi biasanya berupa tenaga kerja dan modal, teknologi dan tersedianya sumber daya alam dan keterampilan manajemen. Menyusun sistem fungsi produksi keseluruhan suatu bangsa yang dapat meliputi seluruh masukan faktor yang terdapat dalam masyarakat. Variabel non ekonomi meliputi variabel politik, sosial dan budaya masyarakat setiap negara mempunyai kekhasan masing-masing. Bahwa kenyataannya setiap negara sesungguhnya mempunyai faktor spesifik negara yang khas. Faktor ketiga adalah variabel pemerintah yang harus diperhatikan oleh perusahaan penanaman modal asing di mana modal asing akan masuk. Setiap negara mempunyai kekhususan merek politiknya sendiri. Para politisi mencerminkan faktor spesifik lokasi bangsa. Selalu terdapat keragaman dalam campur tangan pemerintah dalam bisnis internasional (investasi).

Menurut teori ekonomi Neoklasik berpendapat bahwa penanaman modal asing/ *foreign direct investment* (FDI) memiliki kontribusi yang positif terhadap pembangunan ekonomi *host country*. Modal asing yang dibawa ke *host country* akan digunakan untuk berbagai usaha sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Teori ini memandang bahwa investasi asing secara keseluruhan bermanfaat atau menguntungkan *host country*.

Menurut teori Ketergantungan (*dependency theory*) Teori ini secara diametral berlawanan dengan teori ekonomi neoklasik dengan berpendapat bahwa FDI tidak menimbulkan makna apa pun bagi pembangunan ekonomi di *host country*. Mereka berpendapat bahwa FDI menindas pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan ketidakseimbangan pendapatan. Teori ini berpendapat bahwa FDI sebagai ancaman terhadap kedaulatan *host country* dan terhadap kebebasan pembangunan kehidupan sosial dan budaya karena investasi asing cenderung memperluas yurisdiksi menggunakan pengaruh dari kekuatan pemerintah asing terhadap *host country* sehingga pengaruh politik investasi asing terhadap *host country* cukup besar.

Menurut teori Jalan Tengah (*the middle path theory*), banyak dari negara berkembang mengembangkan regulasi antara lain mengatur perizinan dan pemberian insentif melalui kebijakan investasi. Menurut teori ini investasi asing

memiliki aspek positif dan aspek negatif terhadap host country, karena itu host country harus dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana. Kehati-hatian dan kebijaksanaan dapat dilakukan dengan mengembangkan kebijakan regulasi yang adil.

Menurut teori Intervensi Pemerintah (*government intervention theory*), pendukung dari teori ini berpendapat bahwa perlindungan terhadap *invant industries* di negara-negara berkembang dan kompetensi dengan industri di negara-negara maju merupakan hal yang esensial bagi pembangunan nasional. Teori ini melihat pentingnya peran negara yang otonom yang mengarahkan langkah kebijakan ekonomi termasuk investasi, peran negara dipercaya akan bisa mengintervensi pasar untuk mengoreksi ketimpangan pasar dan memberikan perlindungan kepada *invant industries*, kepentingan masyarakat, pengusaha domestik dan perlindungan lingkungan. Peran negara juga dapat memberi perlindungan bagi kepentingan para investor termasuk investor asing.

Tujuan menanamkan modal di negara lain yang dilakukan perusahaan-perusahaan di berbagai negara agar terhindar dari hambatan tarif dan nontarif yang biasanya digunakan dalam perdagangan internasional dalam kegiatan impor. Penanaman modal luar negeri juga berusaha memanfaatkan berbagai insentif dalam bentuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah lokal untuk mendorong peningkatan FDI.

Penanaman modal asing langsung yang dilakukan suatu negara ke negara lain juga membawa dampak bagi negara tujuan penanaman modal tersebut. Salah satu diantaranya adalah dengan adanya penanaman modal asing akan berdampak pada penurunan tingkat ketimpangan negara tujuan investasi. Meningkatnya FDI di suatu negara akan menambah jumlah lapangan pekerjaan di negara tersebut. Hal ini karena dengan adanya penambahan modal bagi suatu perusahaan maka akan membuat perusahaan tersebut dapat menambah pekerja di perusahaan tersebut guna meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses produksi.

Meningkatnya lapangan pekerjaan itu akan menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan pendapatan per-orang. Peningkatan pendapatan per-orang tersebut akan membuat kemampuan konsumsi masyarakat negara tersebut akan

meningkat dan semakin lama tingkat konsumsi akan merata. Pemerataan tingkat konsumsi ini dapat ditunjukkan dengan penurunan tingkat ketimpangan di negara tersebut. Hal tersebut harus didukung tidak hanya dari adanya penanaman modal asing tersebut, namun dengan adanya pemerataan distribusi modal asing tersebut juga diperlukan guna untuk memperluas lapangan pekerjaan agar tidak hanya di pusat perekonomian tapi juga di wilayah-wilayah lain di negara tersebut sehingga penanaman modal asing akan menunjukkan dampak yang efektif bagi negara tujuan penanaman modal tersebut.

2.1.7 Korelasi Keterbukaan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan

a) Korelasi Perdagangan Internasional dan Ketimpangan Pendapatan

Menurut Boediono (2014), terdapat dua sudut pandang mengenai korelasi perdagangan internasional dan ketimpangan pendapatan, yaitu sebagai berikut:

1) Perdagangan internasional berpengaruh positif terhadap pemerataan distribusi pendapatan.

Kaum Neoklasik mengemukakan pendapatnya bahwa perdagangan luar negeri mempunyai pengaruh lebih meratakan distribusi pendapatan di dalam negeri dan antarnegara melalui saluran perdagangan dan saluran aliran modal. Bekerjanya proses pemerataan pendapatan melalui perdagangan internasional dapat didasarkan pada teorema Heckser-Ohlin (Boediono, 2014).

Ide ini bermula ketika kita menganggap ada dua negara, yaitu A dan B. Negara A yang lebih padat kapital dibandingkan tenaga kerja, sehingga berspesialisasi dalam produk padat kapital. Sedangkan negara B lebih relatif banyak tenaga kerja dibandingkan dengan barang kapital sehingga berspesialisasi pada produksi barang-barang padat tenaga kerja. Ketika terjadi perdagangan, pada negara B, harga barang kapital relatif dan harga tenaga kerja relatif meningkat dan penghasilan pemilik kapital menurun. Sebaliknya, pada negara A, penghasilan buruh menurun dan penghasilan pemilik modal meningkat. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perdagangan internasional cenderung meratakan distribusi pendapatan.

Selain itu Krugman dan Obstfeld (2004) mengungkapkan pendapatnya bahwa perdagangan internasional secara potensial selalu menguntungkan suatu negara karena perdagangan selalu memperluas pilihan-pilihan perekonomian. Perluasan pilihan-pilihan ini berarti bahwa perdagangan selalu berpotensi untuk mendistribusikan pendapatan sedemikian rupa sehingga setiap orang punya peluang untuk turut menikmati keuntungan-keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan perdagangan internasional tersebut.

Di sisi lain, J.S Mill berpendapat bahwa perdagangan internasional mempunyai manfaat langsung dan tidak langsung. Manfaat langsung dari perdagangan internasional adalah untuk perolehan keuntungan dari kegiatan ekspor agar dapat menaikkan pendapatan nasional, dan dapat menaikkan output serta laju pertumbuhan ekonomi (Jhingan, 2012). Sedangkan manfaat tidak langsung dari adanya perdagangan internasional antara lain: 1) membantu pertukaran barang-barang yang memiliki kemampuan pertumbuhan rendah dengan barang-barang luar negeri yang memiliki kemampuan pertumbuhan tinggi; 2) adanya “pengaruh mendidik” untuk meningkatkan ketrampilan tertentu, memberikan dasar pengetahuan bagi pemasukan modal luar negeri ke negara-negara terbelakang.

2) Perdagangan internasional berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan

Menurut Boediono (2014), golongan ini tidak percaya dengan pendapat kaum Neoklasik dengan berpendapat bahwa perdagangan bebas dan penanaman modal asing justru tidak jarang mempertajam ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat baik antarnegara maupun di dalam negara.

Dalam pandangan Myrdal pun perdagangan internasional dapat meningkatkan ketimpangan regional dan internasional. Perdagangan akan menguntungkan wilayah maju dan merugikan wilayah kurang maju. Pembebasan dan perluasan pasar sering memberikan keuntungan daya saing pada industri di sentra-sentra pengembangan sudah mapan (Jhingan, 2012).

Begitu juga dengan Nikoloski (2009) menurutnya perdagangan internasional dapat meningkatkan ketimpangan. Hal ini juga ia dasarkan dari

teorema Heckscher-Ohlin. Menurut Nikoloski, teorema ini mengimplikasikan bahwa keterbukaan perdagangan internasional meningkatkan hasil dari faktor produksi yang relatif berlimpah dan mengurangi kembalinya faktor produksi yang relatif langka. Oleh karena itu, keterbukaan perdagangan akan menghasilkan peningkatan ketimpangan di negara-negara kaya modal dan penurunan ketimpangan di negara-negara yang berlimpah tenaga kerja (terutama yang baik diberkahi dengan tenaga kerja tidak terampil).

Kesimpulan yang terdapat dari teorema Heckscher-Ohlin adalah bahwa para pemilik faktor-faktor produksi yang melimpah di suatu negara dapat memperoleh keuntungan dari adanya hubungan perdagangan. Sedangkan para pemilik faktor-faktor produksi yang langka di negara akan mengalami kerugian dari adanya perdagangan (Krugman dan Obstfeld, 2004).

b) Korelasi FDI dan ketimpangan pendapatan.

Dalam teori Neoklasik/*Neo-Classical Economic Theory* berpendapat bahwasanya dalam penanaman modal asing/FDI memiliki kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi *host country*. Modal asing yang dibawa ke *host country* akan digunakan untuk berbagai usaha sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Teori ini memandang bahwa investasi asing secara keseluruhan bermanfaat atau menguntungkan *host country*.

Namun menurut teori ketergantungan/*Dependency Theory* berlawanan dengan teori ekonomi neoklasik bahwasannya FDI tidak menimbulkan makna apa pun bagi pembangunan ekonomi di *host country*. Mereka berpendapat bahwa FDI menindas pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan ketidakseimbangan pendapatan. Teori ini berpendapat bahwa FDI sebagai ancaman terhadap kedaulatan *host country* dan terhadap kebebasan pembangunan kehidupan sosial dan budaya karena investasi asing cenderung memperluas yurisdiksi menggunakan pengaruh kekuatan pemerintah asing terhadap *host country* sehingga pengaruh politik investasi asing terhadap *host country* cukup besar.

Dalam kaitan investasi asing dan ketimpangan pendapatan, terdapat beberapa tulisan yang berusaha menganalisis hal tersebut, salah satunya tulisan karya Sadik dan Bolbol (2001). menurut Sadik dan Bolbol menjelaskan bahwa

ada perbedaan tingkat upah yang diberikan perusahaan asing dengan perusahaan domestik sehingga akan memberikan kontribusi langsung terhadap ketimpangan tingkat upah antar perusahaan. Selain perbedaan nilai upah, terdapat pula perbedaan komposisi pekerja di perusahaan asing dan perusahaan domestik. Perusahaan asing yang cenderung menggunakan teknologi maju cenderung lebih membutuhkan tenaga kerja terampil dibanding tenaga kerja tidak terampil. Oleh karena itu rata-rata tingkat pendidikan pekerja di perusahaan asing lebih tinggi daripada tingkat pendidikan pekerja di perusahaan domestik. Padahal masyarakat di negara berkembang mayoritas berkategori tenaga kerja tidak terampil. Dengan demikian akan semakin timpang pendapatan yang diterima antara tenaga kerja terampil dan tenaga kerja tidak terampil (Simbolon, 2011).

Dari teori tersebut bahwa *host country* membutuhkan keberadaan investasi asing bagi pembangunan ekonomi negaranya, akan tetapi seperti halnya *host country* yang memiliki kepentingan, investor asing tentunya juga memiliki kepentingan. Sebagai pelaku ekonomi jelas kepentingan investor asing adalah mencari keuntungan maksimal. Sehingga diperlukan kerjasama yang baik agar kepentingan masing-masing tidak merugikan kedua belah pihak.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	Jalil, Abdul. (2012)	Hubungan antara keterbukaan dan ketimpangan dalam kerangka berpikir Kuznet di China	Variabel Terikat: Koefisien Gini. Variabel Bebas: Laju pertumbuhan PDB perkapita, Keterbukaan (rasio perdagangan/tingkat tarif rata-rata/tingkat tarif efektif/globalisasi ekonomi /globalisasi), Indeks pembangunan keuangan, Inflasi.	ARDL (<i>Auto Regressive Distriuted lag</i>).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya hubungan bentuk kurva antara keterbukaan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan. 2. Ditemukan Hubungan positif antara indeks pembangunan keuangan dengan tingkat ketimpangan. 3. Terjadinya hubungan negatif yaitu antara infasi dengan tingkat ketimpangan pendapatan.
2.	Lee, Jong-eun. (2010)	Efek Globalisasi pada Ketimpangan di 11 Negara Asia tahun 1960-2003	Variabel Terikat: Koefisien Gini. Variabel Bebas: PDB perkapita, Keterbukaan perdagangan, FDI.	OLS, <i>Random Effect</i> , <i>Fixed Effect</i> dan TSLS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada pengujian OLS dan <i>random effect</i>, koefisien FDI, perdagangan, perdagangan internasional, PDB perkapita serta pendidikan masih terlihat signifikan. 2. Pada pengujian <i>fixed effect</i>, hanya FDI dan nilai dari tambahan manufaktur yang cukup signifikan. 3. Pengujian TSLS, perdagangan dan perdagangan internasional yang signifikan 4. Hubungan yang berbentuk kurva U-terbalik yaitu antara ketimpangan dan keterbukaan perdagangan ada didalam pengujian <i>random effect</i> dan TSLS.
3.	Hesti Febrian.	Analisis Hubungan	Variabel Terikat:	Uji Stasioneritas,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil uji stasioneritas bahwa variabel IW,

	(2016)	antara Ketimpangan Pendapatan dan Keterbukaan Perdagangan Pasca Krisis Ekonomi: Kerangka Berfikir Kurva Kuznets.	Koefisien Gini. Variabel Bebas: Laju Pertumbuhan Ekonomi, Keterbukaan Perdagangan, Indeks Pembangunan Keuangan, Inflasi.	Uji Integrasi, Uji Kointegrasi.	GR, OPEN dan INF bersifat stasioner atau I(0). Sedangkan FD bersifat non Stasioner. 2. Hasil uji integrasi diperoleh bahwa variabel IW, GR, OPEN, FD dan INF bersifat stasioner, namun variabel yang non stasioner pada <i>second difference</i> atau lebih. 3. Hasil uji kointegrasi menunjukkan bahwa nilai residu (<i>error</i>) dari estimasi bersifat stasioner.
4.	Tasya Aulya Rachmatia. (2018).	Analisis Pengaruh Keterbukaan Perdagangan terhadap Tingkat Ketimpangan Di Indonesia dan Thailand.	Variabel Terikat: Koefisien Gini. Variabel Bebas: GDP Perkapita, Impor, Ekspor, dan Inflasi.	<i>Vector Error Correction Model</i> (VECM), <i>Error Correction Model</i> (ECM).	Berdasarkan hasil VECM, bahwa pada jangka pendek hanya (LNFFDI) dan inflasi (INF) snagan berpengaruh pada signifikan terhadap ketimpangan di Indonesia. sedangkan variabel GDP per kapita, impor dan ekspor tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat ketimpangan di Indonesia
5.	Ho Yin Yue. (2011)	<i>Income Inequality, Economic Growth and Inflation: A Study In korea.</i>	Variabel Terikat: Koefisien Gini. Variabel Bebas: GDP dan Inflasi.	<i>Error Correction Model</i> (ECM)	Tidak terdapat hubungan antara peningkatan CPI dan distribusi pendapatan di korea
6.	Marinko dan Sasa. (2014)	<i>Income Distribution Determinants and Inequality-International Comparison.</i>	Variabel Terikat: Koefisien Gini. Variabel Bebas: Ekspor, Inflasi, Pengangguran, Angkatan Kerja.	Regresi Panel	Inflasi, pengangguran, ekspor dan labor force merupakan determinan utama di antara distribusi pendapatan yang memiliki dampak secara langsung terhadap disribusi pendapatan, CPI memiliki hubungan positif dengan ketimpangan.
7.	Junirda. (2016)	<i>Financial Development,</i>	Variabel Terikat: Pertumbuhan Ekonomi.	VECM	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa <i>trade openness</i> dan <i>foreign direct investment</i>

		<i>Foreign Direct Investment, dan Trade Openness.</i>	Variabel Bebas: Perdagangan Internasional dan FDI.		berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN5+3.
8.	Popibulaya. (2015)	<i>Trade Openness and Income Inequality: 86 Country.</i>	Variabel Terikat: Koefisien Gini. Variabel Bebas: Perdagangan Internasional	OLS	Meningkatkan keterbukaan perdagangan mengakibatkan semakin parahnya ketimpangan pendapatan pada sebagian besar negara, namun ketika dilakukan regresi dengan memisahkan antara negara maju dan negara berkembang, hasil yang didapatkan yaitu ketimpangan akan semakin meningkat ketika keterbukaan perdagangan meningkat di negara berkembang, sedangkan pada negara maju hasil yang didapatkan bertolak belakang dengan negara berkembang.
9.	Jakobsson. (2006)	<i>Trade Openness and Income Inequality: 8 Country.</i>	Variabel Terikat: Koefisien Gini. Variabel Bebas: Perdagangan Internasional.	OLS	Meningkatkan keterbukaan perdagangan mengakibatkan semakin parahnya ketimpangan pendapatan pada beberapa negara.

2.2.1 Perbedaan dan Persamaan dari Penelitian Sebelumnya

No.	Perbedaan	Persamaan
1.	Dalam penelitian ini menggunakan metode kausalitas Granger dan penelitian sebelumnya menggunakan metode ARD.	Menguji hubungan antara keterbukaan dan ketimpangan.
2.	Dalam penelitian ini menggunakan metode kausalitas Granger, dan penelitian sebelumnya menggunakan metode yang digunakan OLS, Random effect, Fixed effect dan TSLS.	Meneliti dampak globalisasi pada ketimpangan.
3.	Dalam penelitian ini menggunakan metode kausalitas Granger dan penelitian sebelumnya menggunakan metode ECM	untuk mengetahui hubungan antara ketimpangan pendapatan dan keterbukaan perdagangan.
4.	Dalam penelitian ini dilakukan hanya di Indonesia dan penelitian sebelumnya dilakukan di dua negara Indonesia dan Thailand.	Metode yang digunakan dalam penelitian sama.
5.	Dalam penelitian ini menggunakan metode kausalitas Granger dan penelitian sebelumnya menggunakan metode ECM	Meneliti tingkat ketimpangan pendapatan di masing-masing negara akibat timbulnya dari perdagangan internasional .
6.	Dalam penelitian ini menggunakan metode kausalitas Granger dan penelitian sebelumnya menggunakan metode Regresi Panel.	Adanya hubungan antara distribusi pendapatan dan variabel ekonomi terkait lainnya dan dampaknya terhadap distribusi pendapatan.
7.	Dalam penelitian ini meneliti korelasi keterbukaan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Indonesia dan penelitian sebelumnya meneliti pengaruh FDI terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN.	peran investasi langsung asing dan keterbukaan perdagangan sebagai pendorong pembangunan berkelanjutan.
8.	Dalam penelitian menggunakan metode kausalitas Granger dan penelitian sebelumnya menggunakan metode OLS.	faktor spesifik suatu negara berubah menjadi faktor penentu penting dari keterbukaan perdagangan dan ketimpangan pendapatan.
9.	Dalam penelitian ini menggunakan metode kausalitas Granger, penelitian hanya dilakukan di Indonesia dan penelitian sebelumnya menggunakan metode OLS dan penelitian dilakukan di 8 negara.	Pengaruh adanya keterbukaan perdagangan terhadap ketimpangan.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran umum yang menjelaskan alur pemikiran dalam sebuah penelitian. Dari latar belakang dan landasan teori yang telah diuraikan dalam penelitian analisis korelasi keterbukaan ekonomi dan tingkat ketimpangan apakah memiliki dampak pada pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia.

Korelasi keterbukaan ekonomi (perdagangan Internasional, FDI) dan ketimpangan pendapatan dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi di Indonesia. Dampak tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan dan menyebabkan ketimpangan pendapatan di Indonesia.

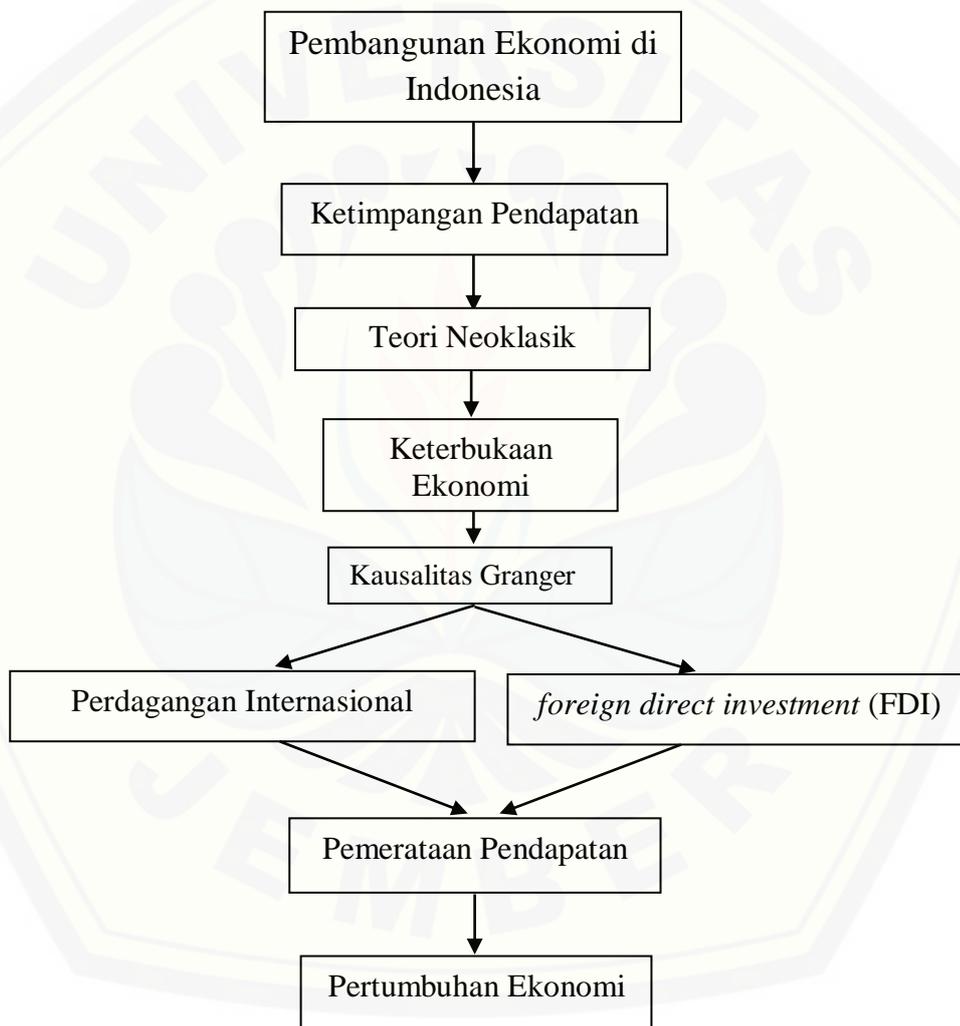
Pembangunan ekonomi memiliki salah satu permasalahan yaitu ketidakmerataannya pendapatan di Indonesia atau tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia sangat tinggi. Dengan adanya keterbukaan ekonomi kemungkinan besar dapat meratakan distribusi pendapatan di Indonesia sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menurut J.S Mill berpendapat bahwa perdagangan internasional mempunyai manfaat langsung dan tidak langsung. Manfaat langsung dari perdagangan internasional adalah perolehan keuntungan dari kegiatan ekspor yang dapat menaikkan pendapatan nasional, yang kemudian dapat menaikkan output dan laju pertumbuhan ekonomi. Sedangkan manfaat tidak langsung dari adanya perdagangan internasional antara lain: 1) membantu pertukaran barang-barang yang memiliki kemampuan pertumbuhan rendah dengan barang-barang luar negeri yang memiliki kemampuan pertumbuhan tinggi; 2) adanya “pengaruh mendidik” untuk meningkatkan ketrampilan tertentu, memberikan dasar pengetahuan bagi pemasukan modal luar negeri ke negara-negara terbelakang.

Sedangkan menurut teori Neoklasik/*Neo-Classical Economic Theory* berpendapat bahwasanya dalam penanaman modal asing/FDI memiliki kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi *host country*. Modal asing yang dibawa ke *host country* akan digunakan untuk berbagai usaha sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Teori ini memandang bahwa investasi asing secara keseluruhan bermanfaat atau menguntungkan *host country*.

Maka, menurut teori tersebut keterbukaan ekonomi lebih meratakan distribusi pendapatan sehingga dapat meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Berdasarkan kajian diatas, penulis berusaha menyusun kerangka konseptual dalam penelitian ini. Berikut adalah kerangka konseptual pola analisis korelasi keterbukaan ekonomi dan ketimpangan pendapatan:



Gambar 2.3 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian didasari dari teori maupun penelitian terdahulu yang merupakan pemecah dari rumusan masalah untuk sementara. Hipotesis terdiri dari 2, yaitu hipotesis nol (0) dan hipotesis alternatif (a), memiliki dua kemungkinan yaitu diterima ataupun ditolak jika terjadi sesuatu penyimpangan yang terdapat dari fakta sebelumnya.

Objek penelitian ini menggunakan negara Indonesia, karena di negara Indonesia masih merupakan negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang lumayan pesat dengan adanya keterbukaan ekonomi. Namun tidak dapat dipungkiri lagi, dimana di Indonesia pertumbuhan ekonomi tidak dapat tumbuh secara merata sehingga mengakibatkan ketidakmerataan pendapatan.

Berdasarkan pada konsepsi korelasi keterbukaan ekonomi dan ketimpangan pendapatan, maka hipotesis penelitian ini antara lain:

- a. Terdapat korelasi antara perdagangan internasional dengan ketimpangan pendapatan atau terdapat korelasi antara ketimpangan pendapatan dengan perdagangan internasional.
- b. Terdapat korelasi antara FDI dengan ketimpangan pendapatan atau terdapat korelasi antara ketimpangan pendapatan dengan FDI.

BAB 3. METODELOGI PENELITIAN

1.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian kuantitatif. Tipe penelitian yang digunakan dalam data penelitian ini berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Oleh karena itu, peneliti akan menyajikan hasil perhitungan dan menjelaskan secara deskriptif terhadap data yang sudah ada. Tujuan dari analisis deskriptif yaitu hanya menyajikan dan menganalisa data agar bermakna dan komunikatif.

1.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series*. Penelitian ini menggunakan data sekunder pada tahun 1987-2017. Data yang digunakan diterbitkan dari World Bank dalam bentuk pustaka, cetak ataupun digital. Data yang digunakan pada tahun Penggunaan data yang berasal dari World Bank yang diterapkan untuk variabel keterbukaan ekonomi, ketimpangan pendapatan serta variabel lain yang berkaitan dalam penelitian tersebut.

1.3 Spesifikasi Model

Metode Granger menggunakan dua variabel data *time series* yang berhubungan dengan variabel lain, misal X dan Y diformulasikan dalam bentuk regresi. Berikut model dasar yang digunakan untuk menguji kausalitas Granger (Gujarati, 2004):

$$X_t = \sum_{i=1}^m a_i X_{t-i} + \sum_{j=1}^n \beta_j Y_{t-j} + u_{1t} \dots \dots \dots (3.1)$$

$$Y_t = \sum_{i=1}^r \lambda_i Y_{t-i} + \sum_{j=1}^s \delta_j X_{t-j} + u_{2t} \dots \dots \dots (3.2)$$

Dimana X_i dan Y_t adalah variabel X dan Y yang diteliti. Sedangkan u_{1t} dan u_{2t} adalah *error term* diasumsikan yang tidak menghasilkan korelasi serial dan *time lag* $m=n=r=s$.

1.4 Metode Analisis Data

1.4.1 Uji Akar-akar Unit (*Unit Root Test*)

Dalam pengujian kausalitas ada beberapa tahap yang harus dilakukan untuk melakukan penelitian, seperti uji akar-akar unit. Uji akar-akar unit ini dilakukan untuk mengetahui stasioneritas suatu data. Hal ini dikarenakan yang dapat mendasari data *time series* yakni kestasioneritas suatu data. Menurut Wardhono (2004) berpendapat bahwa pentingnya stasioneritas data, bahwa data yang terlalu besar selama periode pengamatan akan memiliki kecenderungan agar dapat mendekati nilai rata-rata tersebut. Apabila data *time series* tidak stasioner maka akan menyebabkan hasil koefisien regresi menjadi tidak efisien atau lancung, bisa disebut dengan *spurious regression*. Regresi lancung adalah suatu keadaan dimana hasil regresi dengan nilai R^2 tinggi namun disertai dengan nilai *Durbin Watson* yang rendah. Jika regresi lancung diinterpretasikan maka hasil analisisnya salah yang dapat mengakibatkan pada salahnya pengambilan keputusan sehingga menimbulkan suatu permasalahan atau keraguan.

Dalam pengujian ini bisa dapat menggunakan metode *Dickey-Fuller test*, *Augmented Dickey-Fuller test*. Pengujian tersebut memiliki asumsi yang berbeda, dimana uji FD berasumsi bahwa kesalahan pengganggu terdistribusi secara independen dan yang identik dengan uji ADF yakni pengembangan dari uji DF yang mengatasi adanya jika kemungkinan ada kesalahan pengganggu (autokorelasi). Berikut formulasi uji ADF (Gujarati, 2004):

$$\Delta Y_t = \beta_1 + \beta_2 + \delta Y_{t-1} + \sum_{i=1}^m a_i \Delta Y_{t-1} + \varepsilon_t \dots\dots\dots(3.3)$$

Keterangan:

Y : variabel yang diamati

ΔY_t : $Y_t - Y_{t-1}$

ΔY_{t-1} : $Y_{t-1} - Y_{t-2}$

t : trend waktu

Sehingga bentuk penurunan formulasi uji ADF yang dapat digunakan dalam variabel penelitian ini adalah sebagai berikut (Gujarti, 2004):

$$\Delta TRD_t = \beta_1 + \beta_2 t + \delta TRD_{t-i} + \sum_{i=1}^m a_i \Delta TRD_{t-i} + \varepsilon_t \dots \dots \dots (3.4)$$

$$\Delta FDI_t = \beta_1 + \beta_2 t + \delta FDI_{t-i} + \sum_{i=1}^m a_i \Delta FDI_{t-i} + \varepsilon_t \dots \dots \dots (3.5)$$

$$\Delta GR_t = \beta_1 + \beta_2 t + \delta GR_{t-i} + \sum_{i=1}^m a_i \Delta GR_{t-i} + \varepsilon_t \dots \dots \dots (3.6)$$

Kemudian, jika ingin mengetahui kriterianya maka harus dibandingkan dengan nilai ADF tabel. Apabila nilai statistik ADF lebih besar dari nilai ADF maka data tersebut stasioner. Sedangkan, jika nilai statistik ADF lebih kecil dibandingkan dengan nilai ADF maka tidak stasioner.

1.4.2 Uji Derajat Integrasi

Uji derajat integrasi dilakukan jika diketahui data tidak stasioner pada saat dilakukan uji unit akar-akar. Uji derajat integrasi dimaksud untuk mengetahui derajat keberapakah data akan stasioner. Secara umum data yang tidak stasioner dibutuhkan deferensiasi sampai ke- d hingga data tersebut menjadi stasioner. Namun, apabila derajat pertama masih tidak stasioner, maka uji integrasi perlu dilanjutkan pada derajat selanjutnya sampai data menjadi stasioner. Bentuk umum formulasi uji integrasi data melalui uji ADF sebagai berikut (Widaryono, 2005):

$$\Delta 2Y_t = \beta_1 + \beta_2 t + \delta Y_{t-i} + \sum_{i=1}^m a_i \Delta 2Y_{t-1} + 1 + \varepsilon_t \dots \dots \dots (3.7)$$

1.4.3 Uji Kointegrasi

Sekumpulan variabel dikatakan memiliki kointegrasi bila mempunyai hubungan keseimbangan pada jangka panjang (Gujarati, 2009). Tujuan dari uji ini adalah untuk mendeteksi akan adanya hubungan jangka panjang antara variabel bebas dan variabel terikatnya. Penelitian ini menggunakan uji kointegrasi metode Engle Granger yang mendeteksi adanya kointegrasi melalui uji stasioneritas pada nilai residual (*error*) hasil regresi. Berikut adalah langkah pengujiannya:

H_0 : terdapat kointegrasi antara variabel bebas dan variabel terikat

H_a : tidak terdapat kointegrasi antara variabel bebas dan variabel terikat

Pengambilan keputusan dilakukan dengan adanya kriteria sebagai berikut:

- a. Jika nilai absolut ADF $>$ nilai kritis (1%, 5% atau 10%) maka H_0 ditolak, tidak terdapat kointegrasi antara variabel bebas dan variabel terikat.
- b. Jika nilai absolut ADF $<$ nilai kritis (1%, 5% atau 10%) maka H_0 diterima, terdapat kointegrasi antara variabel bebas dan variabel terikat.

Uji ini juga dilakukan menggunakan Uji Johansen. Uji Johansen menganalisis dengan menggunakan karakteristik matriks bujur sangkar yang menjadi matriks parameter.

1.4.4 Uji *Lag* Optimum

Penentuan *lag* optimum bertujuan untuk mengetahui berapa banyak *lag* yang digunakan dalam estimasi *Granger Causality Test*. Penentuan *lag* optimum dapat diperoleh dari nilai *Akaike Information Criterion* (AIC) yang paling minimum pada keseluruhan variabel yang akan diestimasi. Penentuan tersebut panjang *lag* optimum bisa dilakukan dengan melakukan kriteria dari informasi yang sudah tersedia. Pilihan dari angka *lag* yang ditentukan yaitu dengan panjang *lag* menurut kriteria *Akaike Information Criterion* (AIC) dan *Schwartz Bayesian Criterion* (SBC). *Lag* optimum dapat ditemukan pada spesifikasi model yang memberikan nilai AIC paling minimum (Gujarati, 2003).

1.4.5 Uji Kausalitas Granger (*Granger's Causality Test*)

Penelitian ini menggunakan alat analisis uji kausalitas Granger. Keterbatasan dalam analisis regresi yaitu ketidakmampuannya mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan kausalitas meskipun regresi dapat mengukur tingkat hubungan statistik antara variabel. Granger (1969) melihat keterbatasan tersebut yang akhirnya mencoba mendefinisikan hubungan antara variabel dalam analisis kausalitas. Misal terdapat dua variabel X dan Y, dan muncul pertanyaan apakah variabel X menyebabkan Y, atau Y menyebabkan X. Dengan adanya pertanyaan tersebut maka dilakukan *granger causality test* untuk memprediksi apakah ada hubungan antara kedua variabel berdasarkan data *time series*. Variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu TRD, FDI dan GR, kemudian tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui hubungan kausalitas antara keterbukaan ekonomi dan ketimpangan, kemudian model dasar Granger (3.1) dan (3.2) dapat diturunkan dalam estimasi model sebagai berikut (Kaur, Yadaf dan Gautman 2012):

$$TRD_i = \sum_{i=1}^m a_i TRD_{t-1} + \sum_{j=1}^n \beta_j GR_{t-j} + u_{1t} \dots \dots \dots (3.8)$$

$$GR_i = \sum_{i=1}^r \lambda_i GR_{t-1} + \sum_{j=1}^s \delta_i TRD_{t-j} + u_{1t} \dots \dots \dots (3.9)$$

$$FDI_i = \sum_{i=1}^m a_i FDI_{t-1} + \sum_{j=1}^n \beta_j GR_{t-j} + u_{1t} \dots \dots \dots (3.10)$$

$$GR_i = \sum_{i=1}^r \lambda_i GR_{t-1} + \sum_{j=1}^s \delta_i FDI_{t-j} + u_{1t} \dots \dots \dots (3.11)$$

Keterangan:

TRD: Perdagangan Internasional

FDI: *foreign direct investment*

GR: Gini Rasio (ketimpangan pendapatan)

m,n,r,s: time lag

a_i : koefisien regresi dari (TRD) pada TRD

β_j : koefisien regresi dari (GR) pada TRD

λ_i : koefisien regresi dari (GR) pada GR

δ_j : koefisien regresi dari (TRD) pada GR

a_i : koefisien regresi dari (FDI) pada FDI

β_j : koefisien regresi dari (GR) pada FDI

λ_i : koefisien regresi dari (GR) pada GR

δ_j : koefisien regresi dari (FDI) pada GR

1.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Ketimpangan Pendapatan

Dalam penelitian ini diartikan sebagai suatu keadaan dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat di suatu negara tidak sama. Dalam penelitian ini, ketimpangan pendapatan diukur menggunakan indeks gini yang memiliki rentang nilai 0-1 atau rentang 0-100. Nilai 100 menunjukkan ketimpangan pendapatan sempurna dan nilai 0 menunjukkan pemerataan pendapatan sempurna. Data yang digunakan di Indonesia pada tahun 1987-2017 dalam ukuran satuan persentase.

2. Perdagangan Internasional

Variabel keterbukaan perdagangan dinotasikan dengan OPEN yang dinyatakan dalam persentase. Data ini diperoleh dari perhitungan rasio perdagangan yang berupa perbandingan total ekspor dan impor terhadap PDB atas dasar harga berlaku. Data yang digunakan di Indonesia pada tahun 1987-2017 dalam ukuran satuan persentase.

3. *Foreign Direct Investment* (FDI)

Foreign Direct Investment merupakan salah satu bentuk investasi yang dilakukan oleh perusahaan dari suatu negara untuk menanamkan modalnya dalam jangka waktu panjang dengan perusahaan di negara lainnya. Indikator FDI yang digunakan yaitu Foreign direct investment: Inward and outward flows and stock, annual atau dalam satuan FDI per-kapita. Data yang digunakan di Indonesia tahun 1987-2017 dalam ukuran satuan US\$.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dari analisis kuantitatif, terdapat beberapa kesimpulan penting yang dapat diperoleh dalam penelitian ini, dimana dalam penelitian ini menggunakan metode Kausalitas *Grange*, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak terdapat korelasi perdagangan internasional dan ketimpangan pendapatan di Indonesia.
2. Terdapat korelasi dalam satu arah yaitu korelasi ketimpangan pendapatan dengan FDI di Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Pemerintah harus memaksimalkan kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar mampu mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk bisa bersaing dalam ekspor serta menciptakan kesempatan usaha bagi pengusaha baru melalui bantuan pendanaan tersebut. Salah satu cara untuk mendukung UMKM yaitu melalui sektor pertanian. Di dalam sektor pertanian, ketika pasca panen, dapat memberikan peluang untuk menciptakan usaha baru. Salah satu contohnya, ketika buah apel sudah siap untuk dipasarkan, lalu setelah beberapa hari buah apel tersebut tidak laku terjual, dengan kreatif dari masyarakat dapat membuat peluang usaha dengan cara mengolah buah apel menjadi sesuatu yang baru.
2. Pemerintah harus lebih melihat potensi yang ada di seluruh wilayah di Indonesia dan mempromosikan tidak hanya beberapa wilayah di Indonesia. Peningkatan realisasi FDI di luar Pulau Jawa juga penting dilakukan. Selain itu pemerintah dapat membuat kebijakan investasi yang sesuai dengan kebutuhan di Indonesia yaitu dengan membuat paket kebijakan investasi yang

mengalami perubahan setiap tahunnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan dari pengadaan investasi asing. Hal ini bertujuan agar para investor lebih tertarik terhadap wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia dan persebaran investasi asing yang ada di Indonesia akan lebih merata atau efisien. Pemerataan investasi asing ini juga berdampak pada meningkatkan kesempatan usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan baru di wilayah tersebut. Hal ini akan membantu meningkatkan GDP perkapita yang dapat menurunkan tingkat ketimpangan di Indonesia.

3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperbanyak variabel dalam penelitian dan menggunakan penambahan deret waktu data, sehingga terdapat keragaman data pada setiap variabel yang lebih tereksplorasi. Hal ini turut dapat meningkatkan kekayaan informasi akurat yang dapat diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelia, Yuki. 2010. Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 1995-2008. *Skripsi*: Universitas Diponegoro.
- Ahluwalia, Montek S. 1976. Inequality, Poverty and Development. *World Bank*.
- Andreoni, James & Levinson, Arik. 1998. The Simple Analytics of The Environmental Kuznets Curve. *NBER working paper 6739*.
- Anonim. 2016. Pembangunan Sektor Perdagangan di Indonesia. Diakses dari <http://go.worldbank.org/Y0GTJ72Y90> pada tanggal 23 maret 2016.
- Apridar. 2012. *Ekonomi Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : STIM YKPN.
- Boediono. 2014. *Ekonomi Internasional*. Yogyakarta : BPFÉ.
- Boediono. 1981. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta : BPFÉ.
- BPS. *Statistik Indonesia 1983-2014*. Jakarta: Badan Pusat Statistika.
- Bremmer, Ian. 2011. *Akhir Pasar Bebas*, terj. Alex Tri Kantjono. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Budiarto, Wawan. 2014. *Analisa Disparitas Pendapatan dengan Menggunakan Koefisien Gini dan Indeks Williamson*. Thesis: Institut Pertanian Bogor.
- Chang, Ching-Cheng & Mendy, Michael. 2012. Economic Growth and Openness in Africa: What is the Empirical Relationship?. *Applied Economics Letters*. 19. 1903-1907.
- Deliarnov. 2012. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Rev.ed.. Jakarta: Rajawali Pers.
- Frazer, Garth. 2006. "Inequality and Development Across and Within Countries". *World Development*. Vol. 34 No. 9 hal. 1459-1481.
- Jakobsson, Amanda. 2006. Trade Openness and Income Inequality. *Bachelor Thesis*: Lund University.
- Jhingan, M.L. 2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : Rajawali.

- Krugman, Paul R. & Obstfeld, Maurice. 2004. *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan*. (Alih Bahasa: Dr. Faisal H. Basri, S.E, M.Sc). Jakarta: PT Indeks.
- Lincoln, Arsyad. 1988. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Marelli, Enrico & Signorelli, Marcello. 2011. China and India: Openness, Trade and Effects on Economic Growth. *The European Journal of Comparative Economics*. Vol. 8, n. 1, pp. 129-154.
- Murbarani, Nova. 2014. *Pengaruh Keterbukaan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Antarprovinsi di Indonesia*. Tesis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Nopirin. 1999. *Ekonomi Internasional*. Ed. Ke-3. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Nowbutsing, Baboo M. 2014. The Impact of Openness on Economic Growth: Case of Indian Ocean Rim Countries. *Journal of Economic and Development Studies*. Vol.2, No.2, pp. 407-427.
- Polpibulaya S. 2015. Trade Openness and Income Inequality. *Tesis*. Karolina Selatan(USA): Clemson University.
- Sari, Norma Rita & Pujiyono. 2013. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan antar Provinsi di Indonesia tahun 2004-2010. *Diponegoro Journal of Economics*. Vol. 2 No. 3 Tahun 2013 Hal. 1-15.
- Salvatore Dominick. 2013. *International Economics 11th Edition*. New York(USA): John Wiley & Sons, Inc.
- Saputra, Hanung Baktianto. 2014. Analisis Kurva U-terbalik (Hipotesis Kuznets) Studi Kasus Indonesia seluruh Provinsi periode 2002-2012. *Skripsi*: Universitas Gajah Mada.
- Sjafrizal. 1997. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*. Jakarta(ID): Prisma LP3ES.
- Subandi. 2008. *Ekonomi Pembangunan*. Bandung : Alfabeta.
- Tambunan, Tulus. 2011. *Perekonomian Indonesia: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. Bogor: rev. ed. Ghalia Pustaka.
- Todaro, Michael dan Stephen Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jilid 1, terj. Haris Munandar. Jakarta: Erlangga.

Yulisa A. 2017. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi Langsung Asing di Thailand. *Skripsi*. Bogor(ID): Institut Pertanian Bogor.



LAMPIRAN A. DATA PENELITIAN

A. Data Penelitian Pada Perdagangan Internasional, FDI dan Ketimpangan Pendapatan

Tahun	TRD	FDI	GR
1987	46,97424788	385000000	1,485721426
1988	47,25456142	576000000	1,488550717
1989	49,08188369	682000000	1,456366033
1990	52,89186144	1093000000	1,494154594
1991	54,83956488	1482000000	1,50242712
1992	57,42743411	1777000000	1,485721426
1993	50,52338589	2004000000	1,505149978
1994	51,87710105	2109000000	1,515873844
1995	53,95859006	4346000000	1,523746467
1996	52,26474366	6194000000	1,536558443
1997	55,99385881	4677000000	1,51054501
1998	96,18619236	-240800000	1,492760389
1999	62,94391286	-1865620963	1,491361694
2000	71,43687592	-4550355286	1,45484486
2001	69,79320753	-2977391857	1,462397998
2002	59,07946177	145085549	1,501059262
2003	53,61649375	-596923828	1,50242712
2004	59,76129484	1896082770	1,514547753
2005	63,98793587	8336257208	1,51851394
2006	56,65712681	4914201435	1,534026106
2007	54,82924998	6928480000	1,552668216
2008	58,56139963	9318453650	1,545307116
2009	45,51212137	4877369178	1,545307116
2010	46,70127388	15292009411	1,561101384
2011	50,18001318	20564938227	1,598790507
2012	49,5828983	21200778608	1,597695186
2013	48,63737268	23281742362	1,600972896
2014	48,08017559	25120732060	1,595496222
2015	41,93764024	19779127977	1,598790507
2016	37,4213418	4541713739	1,586587305
2017	39,36274549	21464553719	1,580924976

LAMPIRAN B. HASIL ANALISIS UJI AKAR-AKAR UNIT DAN UJI DERAJAT INTEGRASI

1. Hasil Uji Akar-Akar Unit Derajat Kointegrasi (*Augmented Dickey Fuller*) Pada Tingkat Level Perdagangan Internasional, FDI dan Ketimpangan Pendapatan

a. Pada Tingkat Level Perdagangan Internasional

Null Hypothesis: TRD has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-2,868634	0,0610
Test critical values: 1% level	-3,670170	
5% level	-2,963972	
10% level	-2,621007	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(TRD)

Method: Least Squares

Date: 07/13/19 Time: 16:10

Sample (adjusted): 1988 2017

Included observations: 30 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
TRD(-1)	-0,479167	0,167037	-2,868634	0,0078
C	26,06843	9,345291	2,789472	0,0094
R-squared	0,227140	Mean dependent var	-0,253717	
Adjusted R-squared	0,199538	S.D. dependent var	10,84519	
S.E. of regression	9,703032	Akaike info criterion	7,447094	
Sum squared resid	2636,167	Schwarz criterion	7,540508	
Log likelihood	-109,7064	Hannan-Quinn criter.	7,476978	
F-statistic	8,229061	Durbin-Watson stat	2,234688	
Prob(F-statistic)	0,007754			

b. Pada Tingkat Level FDI

Null Hypothesis: FDI has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-1,352799	0,5916
Test critical values: 1% level	-3,670170	
5% level	-2,963972	
10% level	-2,621007	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(FDI)

Method: Least Squares

Date: 07/13/19 Time: 16:12

Sample (adjusted): 1988 2017

Included observations: 30 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
FDI(-1)	-0,159745	0,118085	-1,352799	0,1869
C	1,67E+09	1,20E+09	1,395071	0,1740
R-squared	0,061350	Mean dependent var	7,03E+08	
Adjusted R-squared	0,027826	S.D. dependent var	5,33E+09	
S.E. of regression	5,25E+09	Akaike info criterion	47,66693	
Sum squared resid	7,73E+20	Schwarz criterion	47,76034	
Log likelihood	-713,0039	Hannan-Quinn criter.	47,69681	
F-statistic	1,830065	Durbin-Watson stat	1,957024	
Prob(F-statistic)	0,186944			

c. Pada Tingkat Level Ketimpangan Pendapatan

Null Hypothesis: GR has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-0,975200	0,7491
Test critical values: 1% level	-3,670170	
5% level	-2,963972	
10% level	-2,621007	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(GR)

Method: Least Squares

Date: 07/13/19 Time: 16:08

Sample (adjusted): 1988 2017

Included observations: 30 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GR(-1)	-0,075034	0.076942	-0.975200	0.3378
C	0,117623	0.117408	1.001829	0.3250
R-squared	0,032849	Mean dependent var	0,003173	
Adjusted R-squared	-0,001692	S.D. dependent var	0,018408	
S.E. of regression	0,018423	Akaike info criterion	-5,086056	
Sum squared resid	0,009504	Schwarz criterion	-4,992643	
Log likelihood	78,29084	Hannan-Quinn criter.	-5,056172	
F-statistic	0,951016	Durbin-Watson stat	1,967612	
Prob(F-statistic)	0,337811			

2. Hasil Uji Akar-Akar Unit dan Uji Derajat Kointegrasi (*Augmented Dickey Fuller*) pada Tingkat Level Perdagangan Internasional, FDI, Ketimpangan Pendapatan

a. Pada Tingkat *First Difference* Perdagangan Internasional

Null Hypothesis: D(TRD) has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-8,311105	0,0000
Test critical values: 1% level	-3,679322	
5% level	-2,967767	
10% level	-2,622989	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(TRD,2)

Method: Least Squares

Date: 07/13/19 Time: 16:11

Sample (adjusted): 1989 2017

Included observations: 29 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(TRD(-1))	-1,438624	0,173097	-8,311105	0,0000
C	-0,416619	1,876759	-0,221989	0,8260
R-squared	0,718968	Mean dependent var		0,057279
Adjusted R-squared	0,708559	S.D. dependent var		18,71251
S.E. of regression	10,10199	Akaike info criterion		7,529814
Sum squared resid	2755,356	Schwarz criterion		7,624111
Log likelihood	-107,1823	Hannan-Quinn criter.		7,559347
F-statistic	69,07447	Durbin-Watson stat		2,230968
Prob(F-statistic)	0,000000			

b. Pada Tingkat Level *First Difference* FDI

Null Hypothesis: D(FDI) has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-5,774837	0,0000
Test critical values: 1% level	-3,679322	
5% level	-2,967767	
10% level	-2,622989	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(FDI,2)

Method: Least Squares

Date: 07/13/19 Time: 16:13

Sample (adjusted): 1989 2017

Included observations: 29 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(FDI(-1))	-1,312755	0,227323	-5,774837	0,0000
C	7,65E+08	9,92E+08	0,771441	0,4471
R-squared	0,552600	Mean dependent var		5,77E+08
Adjusted R-squared	0,536030	S.D. dependent var		7,84E+09
S.E. of regression	5,34E+09	Akaike info criterion		47,70065
Sum squared resid	7,69E+20	Schwarz criterion		47,79495
Log likelihood	-689,6594	Hannan-Quinn criter.		47,73018

F-statistic	33,34875	Durbin-Watson stat	1,924450
Prob(F-statistic)	0,000004		

c. Pada Tingkat Level *First Difference* Ketimpangan Pendapatan

Null Hypothesis: D(GR) has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-5,330708	0,0001
Test critical values: 1% level	-3,679322	
5% level	-2,967767	
10% level	-2,622989	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(GR,2)

Method: Least Squares

Date: 07/13/19 Time: 16:34

Sample (adjusted): 1989 2017

Included observations: 29 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(GR(-1))	-1,029681	0.193160	-5.330708	0.0000
C	0,003289	0.003604	0.912428	0.3696

R-squared	0,512780	Mean dependent var	-0,000293
Adjusted R-squared	0,494735	S.D. dependent var	0,026827
S.E. of regression	0,019069	Akaike info criterion	-5,015043
Sum squared resid	0,009818	Schwarz criterion	-4,920746
Log likelihood	74,71812	Hannan-Quinn criter.	-4,985510
F-statistic	28,41645	Durbin-Watson stat	1,875219
Prob(F-statistic)	0,000013		

LAMPIRAN C. HASIL ANALISIS UJI KOINTEGRASI (5%)

Date: 07/13/19 Time: 16:26

Sample (adjusted): 1989 2017

Included observations: 21 after adjustments

Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: LN_GR LN_TRD LN_FDI

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0,694894	38,27344	29,79707	0,0042
At most 1	0,434855	13,34446	15,49471	0,1028
At most 2	0,062723	1,360315	3,841466	0,2435

Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Max-Eigen Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0,694894	24,92899	21,13162	0,0139
At most 1	0,434855	11,98414	14,26460	0,1112
At most 2	0,062723	1,360315	3,841466	0,2435

Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by $b'S11*b=I$):

LN_GR	LN_TRD	LN_FDI
-226,1710	-11,87375	4,987227
48,30602	11,00430	-0,331775
16,12208	-6,998258	0,193720

Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):

D(LN_GR)	0,007651	-0,000902	-0,001437
D(LN_TRD)	-0,010500	-0,052303	-0,002615
D(LN_FDI)	-0,056458	-0,191540	-0,110777

1 Cointegrating Equation(s):	Log likelihood	92,68537
---------------------------------	-------------------	----------

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

LN_GR	LN_TRD	LN_FDI
1,000000	0,052499	-0,022051
	(0,00841)	(0,00066)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)

D(LN_GR)	-1,730454
	(0,43977)
D(LN_TRD)	2,374690
	(4,54048)
D(LN_FDI)	12,76910
	(29,9950)

2 Cointegrating
Equation(s):

Log
likelihood 98,67744

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

LN_GR	LN_TRD	LN_FDI
1,000000	0,000000	-0,026597
		(0,00177)
0,000000	1,000000	0,086606
		(0,02999)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)

D(LN_GR)	-1,774003	-0,100768
	(0,44666)	(0,03127)
D(LN_TRD)	-0,151880	-0,450893
	(3,52297)	(0,24661)
D(LN_FDI)	3,516577	-1,437395
	(28,6025)	(2,00215)

LAMPIRAN D. HASIL ANALISI UJI LAG

VAR Lag Order Selection Criteria

Endogenous variables: GR TRD

FDI

Exogenous variables: C

Date: 07/13/19 Time: 16:30

Sample: 1987 2017

Included observations: 27

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-680,7081	NA	1,98e+18	50,64504	50,78903	50,68786
1	-651,8609	49,14712*	4,59e+17*	49,17488*	49,75081*	49,34613*

2	-647,2690	6,802730	6,55e+17	49,50141	50,50928	49,80110
3	-642,9637	5,421583	1,00e+18	49,84916	51,28898	50,27729
4	-629,4678	13,99568	8,32e+17	49,51613	51,38790	50,07271

* indicates lag order selected by the criterion

LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)

FPE: Final prediction error

AIC: Akaike information criterion

SC: Schwarz information criterion

HQ: Hannan-Quinn information criterion

LAMPIRAN E. HASIL ANALISIS KAUSALITAS GRANGER

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 07/13/19 Time: 16:31

Sample: 1987 2017

Lags: 1

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
TRD does not Granger Cause GR	30	0,04092	0,8412
GR does not Granger Cause TRD		3,01451	0,0939
FDI does not Granger Cause GR	30	2,01674	0,1670
GR does not Granger Cause FDI		10,1088	0,0037
FDI does not Granger Cause TRD	30	2,68622	0,1128
TRD does not Granger Cause FDI		2,88523	0,1009